



PEMERINTAH
KOTA BALIKPAPAN



LKjIP 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



BAPPEDA LITBANG
KOTA BALIKPAPAN

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan ke arah transparansi dan pelayanan masyarakat yang partisipatif dan akuntabel, yang bermuara pada meningkatnya peran dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, serta adanya pergeseran nilai manajemen pemerintahan menjadi manajemen pemerintahan berbasis kinerja maka implementasi SAKIP harus menjadi komitmen yang berorientasi pada berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai pada akhir periode perencanaan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan suatu Sistem Akuntabilitas yang memadai yang dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang diemban setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan (Bappeda Litbang) sebagai bagian dari unsur Pemerintah Kota mendukung komitmen melalui penyusunan LKjIP Tahun 2025. Hal ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang diemban Bappeda Litbang Kota Balikpapan. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

LKjIP Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025 ini menjabarkan rencana kinerja tahunan, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan dan capaian dari target pada tingkat sasaran program.

Evaluasi LKjIP Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025 diperlukan dalam penyempurnaan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada waktu yang akan datang.

Balikpapan, 27 Februari 2026

Kepala Bappeda Litbang

Kota Balikpapan



RINGKASAN EKSEKUTIF

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Indikator kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Renstra yang dituangkan juga pada dokumen perjanjian kinerja. Indikator kinerja yang tercantum di dalam perjanjian kinerja telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan dengan realisasi pelaksanaannya. Secara umum, Bappeda Litbang Kota Balikpapan pada Tahun 2025 telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan. Hal ini tercermin dari tiga sasaran strategis dengan tiga indikator kinerja yang menjadi target pada Tahun 2025 dengan rata-rata capaian sebesar 101.59%, dengan uraian capaian pada sasaran 1 yaitu meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial dengan capaian 98.84%, sasaran 2 yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah dengan capaian 105.02%, serta sasaran 3 yaitu meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan capaian 100.93%.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan renstra periode baru, sehingga menjadi baseline awal bagi seluruh sasaran strategis indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan baru. Oleh karena itu disajikan pula realisasi capaian kinerja tahun 2025 atas Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai pencapaian kinerja tahunan serta menilai progres terhadap target jangka menengah yang ditetapkan pada periode Renstra Tahun 2025-2029.

Adapun kendala yang dialami dalam hal belum tercapainya sasaran 1 adalah belum tercapainya nilai AKIP Komponen pengukuran kinerja karena beberapa perangkat daerah masih belum melakukan penyesuaian atas hasil capaian target tahun sebelumnya. Beberapa langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah peningkatan kualitas dan pengembangan fitur aplikasi REAKSI sebagai pendukung perencanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja sehingga membantu mempercepat proses penyusunan dokumen dan meminimalkan kesalahan administrasi; melaksanakan evaluasi kinerja dengan menggunakan data dan analisis berbasis bukti (*evidence*) yang terintegrasi pada aplikasi REAKSI.

Selanjutnya juga dirumuskan rekomendasi perbaikan/ rencana tindak lanjut untuk mengatasi kendala yang mungkin terjadi di tahun yang akan datang dapat

diuraikan sebagai berikut: (1) Memperkuat mekanisme penetapan target berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat. Target program hendaknya tidak hanya mengikuti pola administratif, tetapi mencerminkan urgensi pembangunan di lapangan. Perangkat daerah perlu menggunakan data sektoral dan spasial untuk memastikan prioritas lebih seimbang; integrasi lintas perangkat daerah melalui program tematik. Isu-isu seperti kebudayaan, keanekaragaman hayati, transportasi, dan pemberdayaan masyarakat tidak dapat ditangani oleh satu perangkat daerah saja. Perlu forum perencanaan terpadu yang melahirkan program bersama lintas perangkat daerah; (2) Reposisi prioritas pembangunan di sektor-sektor yang masih terabaikan. Program dengan target rendah seperti pelestarian budaya, pengelolaan keanekaragaman hayati, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan perlu dinaikkan statusnya agar sejalan dengan program teknis. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan pembangunan yang inklusif; Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital. Banyak target tinggi yang tercapai secara administratif, tetapi belum terukur dampak nyatanya. Sistem monitoring berbasis data digital, yang menghubungkan IKU RPJMD dengan IKU OPD, dapat membantu memastikan capaian benar-benar berdampak; (3) Membangun pola kolaborasi berkelanjutan antar perangkat daerah. Saat ini koordinasi cenderung terjadi di tahap evaluasi, bukan sejak perencanaan. Dengan membangun pola kolaborasi sejak tahap penyusunan program, maka disparitas capaian antar perangkat daerah dapat ditekan, dan pembangunan daerah menjadi lebih sinkron.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Ringkasan Eksekutif		ii
Daftar Isi		iv
Daftar Tabel		vi
Daftar Gambar		viii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Dasar Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	2
1.4	Gambaran Umum Perangkat Daerah	3
1.5	Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	4
1.6	Sistematika Penulisan	5
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	7
2.1	Perencanaan Strategis	7
2.2	Indikator Kinerja Utama	17
2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	24
Bab III	AKUNTABILITAS KINERJA	33
3.1	Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	33
3.2	Capaian Kinerja Organisasi	38
3.2.1	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	38
3.2.2	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	43
3.2.3	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis	48
3.2.4	Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM/ Standar Nasional/ Internasional (<i>Benchmark</i> Kinerja)	53
3.2.5	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	55

	3.2.6 Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)		60
	3.2.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya		122
	3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025		132
Bab IV	PENUTUP		135
	4.1 Kesimpulan		135
	4.2 Saran		135
LAMPIRAN			

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2021-2026	8
Tabel	2.2	Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025-2029	10
Tabel	2.3	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran	12
Tabel	2.4	Indikator Kinerja Utama Perubahan Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2021-2026	18
Tabel	2.5	Indikator Kinerja Utama Perubahan Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025-2029	21
Tabel	2.6	Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025	24
Tabel	2.7	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	25
Tabel	2.8	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025-2029	26
Tabel	2.9	Rencana Anggaran Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025	28
Tabel	3.1	Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025	33
Tabel	3.2	Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025	36
Tabel	3.3	Predikat Capaian Kinerja	38
Tabel	3.4	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	39
Tabel	3.5	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025-2029	41
Tabel	3.6	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	44
Tabel	3.7	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Bappeda Litbang Tahun 2025-2029 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	46

Tabel	3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Bappeda Litbang Tahun 2021-2026	49
Tabel	3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025-2029	51
Tabel	3.10	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025	56
Tabel	3.11	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja pada Masa Transisi Renstra	61
Tabel	3.12	Realisasi Capaian Kinerja Berdasarkan Jenis Dokumen	73
Tabel	3.13	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappeda Litbang Kota Balikpapan Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin	123
Tabel	3.14	Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana Bappeda Litbang	125
Tabel	3.15	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	128
Tabel	3.16	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025/ Renstra Bappeda Litbang Tahun 2025-2029	129
Tabel	3.17	Realisasi Anggaran Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar	3.1	Grafik Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)		40
Gambar	3.2	Grafik Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)		42
Gambar	3.3	Nilai indeks inovasi daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur		53
Gambar	3.4	Nilai AKIP Bappeda Litbang pada beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur		54
Gambar	3.5	Indeks Inovasi Daerah Kota Balikpapan 2021-2025		97
Gambar	3.6	Grafik Skor IKLH dan IPI Kota Balikpapan Tahun 2021-2025		106
Gambar	3.7	Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappeda Litbang Kota Balikpapan menurut tingkat Pendidikan		124

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

LAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LAKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LAKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja dari program dan kegiatan yang ada di suatu instansi.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dan pertanggung jawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju *Good Governance* yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab. LAKIP disusun berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang LAKIP. Inpres ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah secara utuh yang berada dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis 2021-2026, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan pada tahun mendatang. Laporan ini berisi tentang pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

1.2. Landasan Hukum

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi SAKIP.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
2. Mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Bappeda Litbang Kota Balikpapan sebagai Lembaga Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang Kota Balikpapan adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Kondisi penyelenggaraan pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain:

1. Kelembagaan

Kelembagaan Bappeda Litbang Kota Balikpapan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

2. Mekanisme Perencanaan

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (*participatory planning*).

Sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah atas (*bottom-up*). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan

dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Penyertaan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang Pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota

1.5. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu: perumusan kebijakan teknis perencanaan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang seringkali ditemui, antara lain:

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda Litbang Kota Balikpapan dengan OPD lain;
2. Belum optimalnya pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan peraturan perundangundangan yang ada untuk meningkatkan perencanaan pembangunan di Kota Balikpapan;
3. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan antara Provinsi dan Kota Balikpapan serta antar SKPD;
4. Belum optimalnya keselarasan legislatif dan eksekutif;
5. Masih kurangnya komitmen dan konsistensi OPD atas dokumen perencanaan pembangunan;

6. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama stakeholders dengan Bappeda Litbang Kota Balikpapan;
7. Belum optimalnya pemanfaatan hasilhasil penelitian untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan;
8. Belum optimalnya integrasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Tantangan yang perlu diantisipasi oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam melaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya peraturan yang dikeluarkan untuk hal yang sama;
2. Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka Panjang;
3. Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor;
4. Pengendalian evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

Peluang dalam pengembangan pelayanan PD dalam rangka perencanaan pembangunan daerah antara lain :

1. Adanya sistem perencanaan yang terintegrasi (Aplikasi SIPD);
2. Tersedianya dukungan teknologi informasi dalam menjalankan fungsi organisasi;
3. Adanya peluang peningkatan kompetensi ASN di bidang perencanaan melalui pengembangan jabatan fungsional;
4. Adanya kebijakan nasional dan provinsi yang membutuhkan peran serta daerah dalam pencapaian targetnya.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Bappeda Litbang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara singkat latar belakang penyusunan LAKIP, Struktur organisasi dan Tata Kerja, Aspek Strategis serta permasalahan utama

2. Bab II Perencanaan Kinerja
Memuat Rencana Strategis 2021-2026, Rencana Strategis 2025-2029, Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
Memuat Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran
4. Bab IV Penutup
Menampilkan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi
5. Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis Bappeda Litbang Kota Balikpapan menggambarkan arah kebijakan dan perencanaan kinerja yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025. Mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan, penyusunan perencanaan strategis ini mengacu pada Renstra Tahun 2021–2026 sebagai periode perencanaan sebelumnya dan Renstra Tahun 2025–2029 sebagai periode perencanaan terbaru.

Penyajian perencanaan strategis yang mengacu pada dua dokumen Renstra tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan perencanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah pada masa transisi perencanaan. Selain itu, perencanaan strategis ini menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan pada Tahun 2025, tanpa menyamakan tujuan, sasaran, dan target yang berbeda antar periode Renstra.

Berdasarkan visi Wali Kota Balikpapan yaitu “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka dan Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman” dengan misi yang telah ditetapkan. Bappeda Litbang Kota Balikpapan termasuk dalam misi ke-1 yakni “Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik”. Visi dan misi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Wali Kota Balikpapan dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam waktu lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel		Nilai SAKIP	68.99	75.50	75.52	75.54	75.56	75.58
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan capaian kinerja	51.74	56.22	56.24	56.25	56.27	56.28
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	54	60	62	63	64	65
	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi pada perangkat daerah	Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah	31.52	32,5	33	34	35	36

Sumber: Renstra Bappeda Litbang Tahun 2021-2026

Selanjutnya, sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan dan fokus pembangunan periode perencanaan terbaru, Tujuan dan sasaran Bappeda Litbang Kota Balikpapan tahun 2025-2029 ditentukan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya. Selain itu penentuannya juga didasarkan pada sasaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, dengan visi pembangunan jangka panjang Kota Balikpapan yaitu **“Balikpapan Nyaman untuk Semua 2045: Superhub Industri dan Jasa yang Maju dan Berkelanjutan dengan Semangat Madinatul Iman.** Yang salah satu misi nya adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Berdasarkan hal tersebut, tujuan, sasaran, dan target Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, berkelanjutan dan inovatif		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	84.50	84.80	85.10	85.40	85.70	86.00
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi kinerja	Nilai AKIP Kota Balikpapan komponen perencanaan kinerja	22.53	22.77	22.87	22.94	23.01	23.08
		Nilai AKIP Kota Balikpapan komponen pengukuran kinerja	20.34	20.58	20.68	20.75	20.82	20.89
	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks inovasi daerah	57.21	58.01	58.86	59.72	60.60	61.52
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	75.98	77.20	77.90	78.60	79.30	80.00

Sumber: Renstra Bappeda Litbang Tahun 2025-2029

Perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut merupakan konsekuensi dari penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan pada masing-masing periode Renstra. Meskipun demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian kinerja lintas periode perencanaan. Sehubungan dengan hal tersebut, program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP	75.56	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, berkelanjutan dan inovatif	Indeks perencanaan pembangunan daerah	84.80			
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan capaian kinerja	56.27	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi kinerja	Nilai AKIP Kota Balikpapan komponen perencanaan kinerja	22.77	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Penyusunan perencanaan dan pendanaan	Pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota
				Nilai AKIP Kota Balikpapan komponen pengukuran kinerja	20.58		Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Penyusunan profil pembangunan daerah kabupaten/kota
							Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala dan pelaksanaan pembangunan daerah
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	64	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks inovasi daerah	58.01	Program penelitian dan pengembangan daerah	Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian	Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi
								Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan
							Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial
								Penelitian dan pengembangan partisipasi masyarakat

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan
								Penelitian dan pengembangan lingkungan hidup
								Penelitian dan pengembangan pekerjaan umum
							Pengembangan inovasi dan teknologi	Penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi
								Diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif
								Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan
								Fasilitasi hak kekayaan intelektual
Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi pada perangkat daerah	Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah	35	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP perangkat daerah	77.20	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Administrasi keuangan perangkat daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
							Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan daerah
							Administrasi umum perangkat daerah	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
								Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
								Penyediaan bahan logistik kantor
								Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
								Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
								Fasilitasi kunjungan tamu
								Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau semua kendaraan dinas jabatan
							Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa surat menyurat
								Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
								Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
								Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
							Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
								Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
								Pemeliharaan mebel

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Pemeliharaan perakatan dan mesin lainnya
								Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Sumber: Dokumen Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan

2.2. Indikator Kinerja Utama

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan Nomor 188.4.46/1359/Bappeda Litbang tanggal 22 Desember 2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Perubahan Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, Integratif dan spasial	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja	Indikator yang menggambarkan ketercapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil kinerja daerah (LHE KemenPAN-RB) dengan fokus terhadap komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja.	Nilai AKIP komponen perencanaan dan pengukuran kinerja memiliki bobot masing-masing 30% dari total nilai AKIP keseluruhan yang diperoleh dari LHE KemenpanRB pada tahun berjalan	Dokumen Renstra Bappeda Litbang Tahun 2021-2026	Kepala Badan
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui penelitian, pengembangan dan inovasi	Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kemampuan dan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengembangkan, menerapkan, serta mendiseminasikan inovasi di bidang tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan bentuk inovasi daerah lainnya	METODE PENILAIAN Skor Total = ISP + rata-rata ISI $ISP = \sum_{i=1}^n \text{Skor Indikator Satuan Pemda ke } i$ $\text{Rata-rata ISI} = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \text{Skor Indikator Satuan Inovasi ke } j}{m}$ Skor Jumlah Inovasi = Jumlah Inovasi x 0,2 $IID = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100$ n adalah Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintah Daerah i adalah nomor indikator j adalah nomor inovasi ISP adalah Indikator Satuan Pemda ISI adalah Indikator Satuan Inovasi	Dokumen Renstra Bappeda Litbang Tahun 2021-2026	Kepala Badan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah	Nilai SAKIP BappedaLitbang	Angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang diukur melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan seberapa baik perangkat daerah tersebut dalam merencanakan melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerjanya	Diperoleh dari evaluasi internal yang dilakukan oleh inspektorat daerah (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Nilai Evaluasi AKIP = nilai komponen perencanaan kinerja + nilai komponen pengukuran kinerja + nilai komponen pelaporan kinerja + nilai evaluasi akuntabilitas	Dokumen Renstra Bappeda Litbang Tahun 2021-2026	Kepala Badan

Sumber: SK IKU Perubahan Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Seiring dengan ditetapkannya Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025–2029, di tetapkan juga Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025–2029 melalui Keputusan Kepala Badan. IKU pada Renstra periode terbaru tersebut disusun sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan, sasaran strategis, dan fokus pembangunan periode 2025–2029, serta mulai diimplementasikan pada Tahun 2025 sebagai tahun awal Renstra.

Adapun IKU Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Nomor 100.3.3.7/01/Bappeda Litbang tanggal 02 Januari 2026 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Perubahan Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, berkelanjutan dan inovatif	Indeks perencanaan pembangunan daerah	Merujuk IPPN Bappenas, IPPN mengukur kualitas perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/D) serta keselarasan perencanaan mereka dengan tujuan pembangunan nasional	Poin IPPD = Jumlah indikator komponen sinergi + jumlah indikator komponen kualitas perencanaan + jumlah indikator komponen keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja	Dokumen Renstra Bappeda Litbang Tahun 2025-2029	Kepala Badan
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi kinerja	Nilai AKIP Kota Balikpapan komponen perencanaan kinerja	Indikator yang menggambarkan ketercapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil kinerja daerah (LHE KemenPAN-RB) dengan fokus terhadap Komponen Perencanaan.	Nilai AKIP komponen perencanaan memiliki bobot 30% dari total nilai AKIP keseluruhan yang diperoleh dari LHE KemenpanRB pada tahun berjalan	Dokumen Renstra Bappeda Litbang Tahun 2025-2029	Kepala Badan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Nilai AKIP Kota Balikpapan komponen pengukuran kinerja	Indikator yang menggambarkan ketercapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil kinerja daerah (LHE KemenPAN-RB) dengan fokus terhadap Komponen Pengukuran Kinerja	Nilai AKIP komponen pengukuran memiliki bobot 30% dari total nilai AKIP keseluruhan yang diperoleh dari LHE KemenpanRB pada tahun berjalan	Dokumen Renstra Bappeda Litbang Tahun 2025-2029	Kepala Badan
3	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kemampuan dan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengembangkan, menerapkan, serta mendiseminasikan inovasi di bidang tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan bentuk inovasi daerah lainnya	METODE PENILAIAN Skor Total = ISP + rata-rata ISI $ISP = \sum_{i=1}^n \text{Skor Indikator Satuan Pemda ke } i$ $\text{Rata-rata ISI} = \frac{\sum_{j=1}^m \text{Skor Indikator Satuan Inovasi ke } j}{m}$ Skor Jumlah Inovasi = Jumlah Inovasi x 0,2 $IID = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100$ n adalah Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintah Daerah i adalah nomor indikator j adalah nomor inovasi ISP adalah Indikator Satuan Pemda ISI adalah Indikator Satuan Inovasi	Dokumen Renstra Bappeda Litbang Tahun 2025-2029	Kepala Badan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
4	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP perangkat daerah	Angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang diukur melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan seberapa baik perangkat daerah tersebut dalam merencanakan melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerjanya	Diperoleh dari evaluasi internal yang dilakukan oleh inspektorat daerah (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Nilai Evaluasi AKIP = nilai komponen perencanaan kinerja + nilai komponen pengukuran kinerja + nilai komponen pelaporan kinerja + nilai evaluasi akuntabilitas	Dokumen Renstra Bappeda Litbang Tahun 2025-2029	Kepala Badan

Sumber: SK IKU Bappeda Litbang Tahun 2025-2029

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 merupakan dokumen komitmen kinerja perangkat daerah yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, yang memuat sasaran, indikator, dan target kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan yang berlaku, guna memberikan gambaran komitmen perangkat daerah dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Adapun perjanjian kinerja murni yang ditetapkan pada awal tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja	Nilai	43.87
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui penelitian, pengembangan dan inovasi	Indeks inovasi daerah	Indeks	64
3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP Bappeda Litbang	Nilai	76.49

Sumber: Perjanjian Kinerja (PK) Murni Bappeda Litbang Tahun 2025

Dalam rangka penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan, perubahan kebijakan, serta penyesuaian target dan indikator kinerja agar tetap relevan dengan kondisi dan kebutuhan aktual, maka dilakukanlah perubahan perjanjian kinerja sebagaimana tersaji pada table berikut ini:

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja	Nilai	42.87	43.87
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui penelitian, pengembangan dan inovasi	Indeks inovasi daerah	Nilai	57.21	58.01
3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP Bappeda Litbang	Nilai	75.98	76.49

Sumber: Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Bappeda Litbang Tahun 2025

Sehubungan dengan tahun 2025 yang merupakan masa transisi menuju dokumen perencanaan periode baru, maka dibuat juga Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang disusun dengan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 (periode terbaru). Penyusunan Perjanjian Kinerja ini dimaksudkan untuk mengakomodasi penyesuaian arah kebijakan, sasaran strategis, serta indikator kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan terbaru, sekaligus menjaga kesinambungan pengelolaan kinerja perangkat daerah pada masa transisi perencanaan. Adapun perjanjian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Bappeda Litbang
Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, berkelanjutan dan inovatif	Indeks perencanaan pembangunan daerah	Indeks	84.50	84.80
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi kinerja	Nilai AKIP Kota Balikpapan komponen perencanaan kinerja	Nilai	22.53	22.77
		Nilai AKIP Kota Balikpapan komponen pengukuran kinerja	Nilai	20.34	20.58
3	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks inovasi daerah	Indeks	57.21	58.01
4	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	75.98	76.49

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Bappeda Litbang Tahun 2025/Atas Renstra Bappeda Litbang Tahun 2025-2029

Meskipun Perjanjian Kinerja Perubahan telah mengakomodasi kerangka Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, pelaksanaan program, kegiatan, dan penganggaran pada Tahun 2025 tetap berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026. Hal tersebut dikarenakan Renstra Tahun 2021–2026 masih berlaku dan menjadi dasar perencanaan jangka menengah dalam siklus anggaran yang sedang berjalan. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud, pendanaan Bappeda Litbang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada Tahun Anggaran 2025, Bappeda Litbang melaksanakan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran murni sebesar Rp. 22,221,156,720. Selanjutnya, melalui mekanisme Perubahan Anggaran Tahun 2025, alokasi anggaran tersebut disesuaikan menjadi sebesar Rp. 22,322,309,543, sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Perangkat Daerah secara efektif dan efisien.

Adapun rincian pendanaan program, kegiatan, dan subkegiatan tahun 2025 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.9
Rencana Anggaran Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja	43.87	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		
				Penyusunan perencanaan dan pendanaan		
				Pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota	Rp 2,057,631,540	APBD-P
				Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidadang perencanaan pembangunan daerah		
				Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Rp 918,906,000	APBD-P
				Penyusunan profil pembangunan daerah kabupaten/kota	Rp 260,823,950	APBD-P
				Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah		
				Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala dar pelaksanaan pembangunan daerah	Rp 627,726,725	APBD-P

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui penelitian, pengembangan dan inovasi	Indeks inovasi daerah	64	Program penelitian dan pengembangan daerah		
				Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian		
				Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi	Rp 1,067,174,192	APBD-P
				Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	Rp 15,000,000	APBD-P
				Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan		
				Penelitian dan pengembangan partisipasi masyarakat	Rp 118,562,200	APBD-P
				Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan		
				Penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan	Rp 475,000,000	APBD-P
				Penelitian dan pengembangan lingkungan hidup	Rp 500,000,000	APBD-P
				Penelitian dan pengembangan pekerjaan umum	Rp 400,000,000	APBD-P
				Pengembangan inovasi dan teknologi		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
				Penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	Rp 625,000,000	APBD-P
				Diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	Rp 110,385,000	APBD-P
				Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbang	Rp 127,747,661	APBD-P
				Fasilitasi hak kekayaan intelektual	Rp 294,050,225	APBD-P
3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP Bappeda Litbang	76.49	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		
				Administrasi umum perangkat daerah		
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp 367,000,000	APBD-P
				Administrasi keuangan perangkat daerah		
				Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp 9,996,157,000	APBD-P
				Administrasi kepegawaian perangkat daerah		
				Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp 1,165,000,000	APBD-P
				Administrasi umum perangkat daerah		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 10,000,000	APBD-P
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 535,684,840	APBD-P
				Penyediaan bahan logistik kantor	Rp 498,917,860	APBD-P
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 100,000,000	APBD-P
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 6,760,000	APBD-P
				Fasilitasi kunjungan tamu	Rp 30,000,000	APBD-P
				Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Rp 100,000,000	APBD-P
				Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		
				Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau semua kendaraan dinas jabatan	Rp 468,000,000	APBD-P
				Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		
				Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 4,000,000	APBD-P
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 7,293,500	APBD-P
				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 33,200,000	APBD-P
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp 431,860,000	APBD-P

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
				Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp 199,000,000	APBD-P
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp 278,907,400	APBD-P
				Pemeliharaan mebel	Rp 100,000,000	APBD-P
				Pemeliharaan perakatan dan mesin lainnya	Rp 67,521,450	APBD-P
				Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp 325,000,000	APBD-P
Jumlah					Rp 22,322,309,543	

Sumber: DPA Perubahan Tahun 2025 Bappeda Litbang

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025

No	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2024	Nilai 2025
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30%	23.68	23.78
2	Pengukuran Kinerja	30%	20.71	22.21
3	Pelaporan Kinerja	15%	12.30	12.3
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	19.30	18.91
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100%	75.99	77.20
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Sumber: LHE SAKIP Bappeda Litbang Tahun 2025

Hasil evaluasi AKIP Bappeda Litbang Kota Balikpapan mengalami peningkatan nilai dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1.21 poin. Hal ini menunjukkan implementasi sangat baik, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Penjelasan lebih lanjut atas evaluasi AKIP adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- Telah terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah, dokumen perencanaan kinerja jangka pendek, dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja sesuai dengan mandat;
- Telah terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja;
- Dokumen perencanaan kinerja yaitu Renstra, Renja PD dan Perjanjian Kinerja telah diformalkan dan dipublikasikan tepat waktu;

- Sebagian besar isu strategis telah tertuang dalam dokumen perencanaan kinerja dan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai;
- Sebagian besar indikator kinerja pada Renstra dan perjanjian kinerja telah memenuhi kriteria SMART;
- Sebagian besar anggaran yang ditetapkan dan aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung pada kinerja yang ingin dicapai;
- Sebagian besar target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja telah dicapai dengan baik namun tidak cukup/kurang menantang;
- Rencana aksi kinerja belum sepenuhnya berjalan dinamis karena hasil monitoring dan evaluasi sebagian kecil dievaluasi.

2. Pengukuran Kinerja

- Telah terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator;
- Sudah terdapat mekanisme/SOP pengumpulan data kinerja yang ditetapkan dengan sebagian besar kriteria terpenuhi;
- Data kinerja yang dikumpulkan Sebagian relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan;
- Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala yaitu per triwulan;
- Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi);
- Pemimpin terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja;
- Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja yang didapat dari perbaikan kegiatan/aktivitas yang tidak berdampak terhadap kinerja (outcome/impact);
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas, anggaran dalam mencapai kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

- Laporan kinerja telah disusun dan disampaikan tepat waktu;
- Dokumen laporan kinerja telah dipublikasikan secara luas (dapat diakses masyarakat luas);
- Dokumen laporan kinerja telah diformalkan;

- Dokumen laporan kinerja sebagian besar telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
- Laporan kinerja sebagian besar telah mengungkapkan informasi terkait analisis keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja;
- Informasi kinerja yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan, namun hanya bersifat sebagian;
- Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan untuk perbaikan capaian kinerja, namun belum menyeluruh.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja sebelumnya sebagian telah ditindaklanjuti;
- Telah terjadi upaya perbaikan dan peningkatan kinerja (outcome) dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal namun hanya sebagian indikator kinerja yang mengalami kenaikan capaian kinerja.

Berikut di sajikan matriks tidak lanjut atas hasil evaluasi Inspektorat Kota Balikpapan terhadap laporan hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja (rekomendasi) yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025

No	Komponen	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4
1	Perencanaan kinerja	Agar melakukan perbaikan atas Pohon Kinerja sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan pohon kinerja, yang menginformasikan hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting), untuk kemudian dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja instansi	Telah di lakukan perbaikan atas pohon kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan
2	Pengukuran kinerja	Agar memperbarui SOP pengumpulan data kinerja, dengan memuat penggunaan aplikasi yang ada, sehingga mekanisme pengumpulan data kinerja dapat diandalkan	Telah di lakukan revisi SOP pengumpulan data kinerja yang memuat penggunaan aplikasi REAKSI
3	Pengukuran kinerja	Agar membuat SOP pengumpulan data kinerja untuk indikator sasaran yang dapat dimonitoring secara berkala capaiannya	Telah terdapat SOP pengumpulan data kinerja untuk indikator sasaran
4	Pengukuran kinerja	Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (benchmark kinerja)	a. Pada dokumen LAKIP Bappeda Litbang Tahun 2024 di sub bab 3.2.4 halaman 49 terdapat perbandingan indeks inovasi daerah Kota Balikpapan secara regional namun belum menyandingkan di level nasional; b. Rekomendasi ini akan di laksanakan dalam penyusunan LAKIP tahun selanjutnya.

No	Komponen	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4
5	Pengukuran kinerja	Melakukan revidi atas target indikator yang sudah terlampaui dan meningkatkan target indikator yang sudah tercapai pada perjanjian kinerja agar target lebih menantang dan realistis	Telah dilakukan revidi atas target Indikator Kinerja Utama (IKU)
6	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Agar meningkatkan capaian kinerja pada seluruh indikator kinerja	Bappeda Litbang berkomitmen untuk selalu meningkatkan capaian kinerja yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK)
7	Seluruh Komponen	Agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Seluruh rekomendasi telah di tindak lanjuti

Sumber: Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP 2025

3.2. Capaian Kinerja Organisasi

Tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis diukur dengan menggunakan skala nilai peringkat yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi sebagai berikut:

Tabel 3.3
Predikat Capaian Kinerja

No	Interval Capaian Kinerja	Predikat	Keterangan
1	< 100%	Tidak Tercapai	Kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Perlu evaluasi dan perbaikan untuk mencapai target.
2	= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Kinerja telah memenuhi target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan.
3	> 100%	Melebihi Target	Kinerja melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan hasil yang sangat baik dan efisiensi tinggi.

Sumber: Bagian Organisasi Setdakot Balikpapan

Berikut disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

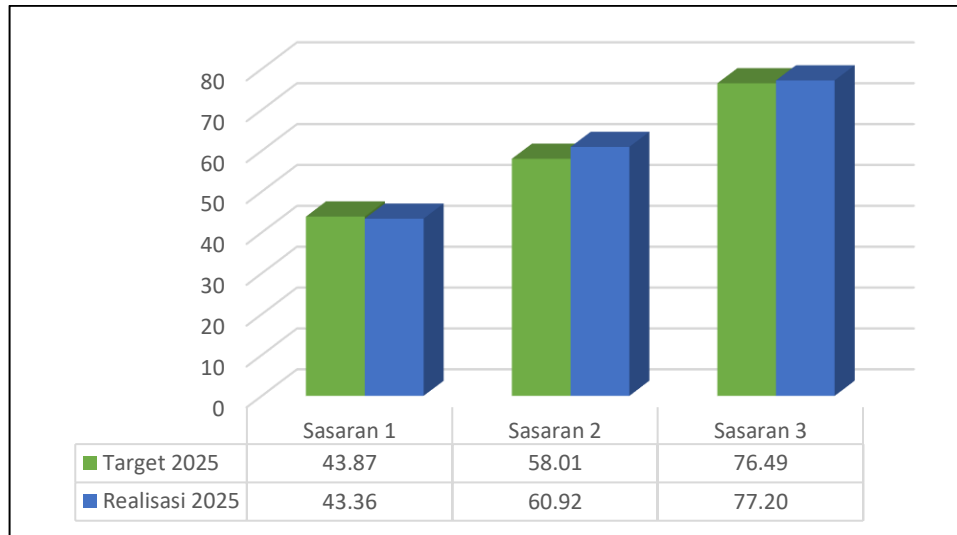
3.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pencapaian kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan tahun 2025 diukur dengan membandingkan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dan realisasi yang dicapai sepanjang tahun tersebut. Penyajian ini dilakukan dengan mengacu pada dua dokumen perencanaan, yaitu Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (periode terbaru), sehingga capaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat secara komprehensif dalam konteks kedua periode perencanaan. Adapun capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	$7 = 6/7 \times 100$	8
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja	Nilai	43.87	43.36	98.84	Tidak Tercapai
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui penelitian, pengembangan dan inovasi	Indeks inovasi daerah	Indeks	58.01	60.92	105.02	Melebihi Target
3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP Bappeda Litbang	Nilai	76.49	77.20	100.93	Melebihi Target

Sumber: Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Bappeda Litbang Tahun 2025



Gambar 3.1

Grafik Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)

Sumber: Laporan Evaluasi Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025

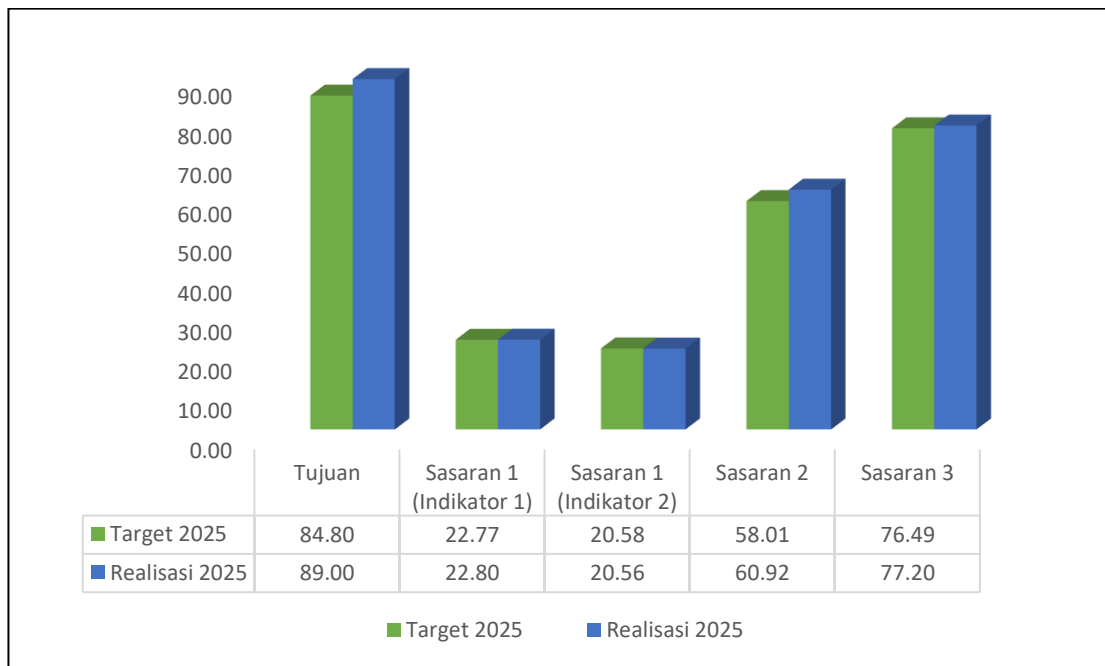
Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata sebesar 101.59% pada tahun 2025. Dengan demikian maka secara umum Bappeda Litbang Kota Balikpapan telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Selain itu, disajikan juga capaian kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra
Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7= 6/7*100	8
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, berkelanjutan dan inovatif	Indeks perencanaan pembangunan daerah	Indeks	84.80	89.00	104.95	Melebihi Target
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi kinerja	Nilai AKIP Kota Balikpapan komponen perencanaan kinerja	Nilai	22.77	22.80	100.13	Melebihi Target
		Nilai AKIP Kota Balikpapan komponen pengukuran kinerja	Nilai	20.58	20.56	99.90	Tidak Tercapai
3	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks inovasi daerah	Indeks	58.01	60.92	105.02	Melebihi Target
4	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	76.49	77.20	100.93	Melebihi Target

Sumber: Perjanjian Kinerja (PK) perubahan Bappeda Litbang tahun 2025 atas Renstra Tahun 2025-2029



Gambar 3.2
Grafik Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)
 Sumber: Laporan Evaluasi Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, terdapat perbedaan data capaian kinerja dengan tabel sebelumnya. Hal ini dikarenakan:

1. Indikator tujuan pada periode Renstra Tahun 2021-2026 tidak diukur dan tidak tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Namun untuk periode Renstra Tahun 2025-2029 indikator tujuan mulai diukur realisasi nya dan ditetapkan pada SK IKU dan perjanjian kinerja setiap tahunnya;
2. Rumusan sasaran mengalami perubahan dibandingkan Renstra periode sebelumnya;
3. Perbedaan perumusan indikator nilai AKIP terlihat antara Renstra Tahun 2025–2029 dan Renstra periode sebelumnya. Pada Renstra 2025–2029, indikator nilai AKIP dijabarkan ke dalam komponen perencanaan dan pengukuran kinerja, sedangkan pada periode sebelumnya indikator nilai AKIP merupakan penjumlahan dari kedua komponen tersebut.

3.2.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Adapun realisasi kinerja dari indikator diatas dapat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2022		2023		2024		2025	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja	Nilai	-	-	42.76	100.94%	42.87	97.83%	43.36	98.84%
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui penelitian, pengembangan dan inovasi	Indeks inovasi daerah	Indeks	57.88	89.80%	39.41	63.56%	57.21	90.81%	60.92	105.02%
3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP Bappeda Litbang	Nilai	83.35	100.45%	68.43	82.36%	75.98	105.53%	77.20	100.93%

Sumber: Laporan Evaluasi Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025

Sasaran 1:

Sasaran ini mengalami kenaikan sebesar 1.01% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini dikarenakan adanya komitmen dari seluruh pihak untuk optimalisasi implementasi AKIP.

Sejak tahun 2023 terdapat perubahan dalam perhitungan capaian nilai AKIP, hal ini dikarenakan terbitnya Peraturan Menteri PanRB tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dimana terdapat perubahan bobot komponen, sub komponen dan kriteria penilaian.

Sasaran 2:

Sasaran ini mengalami kenaikan sebesar 14.21% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan minat keikutsertaan peserta/inovator. Selain itu tingkat kematangan inovasi yang disampaikan juga sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendagri. Adapun penjelasan lebih rinci terhadap capaian sasaran ini akan di bahas pada subbab berikutnya.

Sasaran 3:

Meskipun secara capaian sasaran ini mengalami penurunan 4.6% dari tahun lalu, namun secara realisasi mengalami kenaikan sebesar 1.22 point. Hal ini dikarenakan komitmen dari Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam memenuhi setiap arahan dan rekomendasi dari AKIP Kota Balikpapan dalam hal perbaikan AKIP dari tahun sebelumnya.

Sebagai implementasi awal Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025–2029, maka disajikan capaian kinerja tahun 2025 yang sekaligus menjadi tahun dasar (*baseline*) bagi seluruh indikator sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra
Bappeda Litbang Tahun 2025-2029 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, berkelanjutan dan inovatif	Indeks perencanaan pembangunan daerah	-	-	-	-	84.50	-	84.80	89.00	104.95%
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi kinerja	Nilai AKIP Kota Balikpapan komponen perencanaan kinerja	22.35	-	22.50	99.95%	22.53	99.42%	22.77	22.80	100.13%
		Nilai AKIP Kota Balikpapan komponen pengukuran kinerja	19.35	-	20.26	102.06%	20.34	99.95%	20.58	20.56	99.90%

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks inovasi daerah	57.88	89.80%	39.41	63.56%	57.21	90.81%	58.01	60.92	105.02%
4	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	83.35	100.45%	68.43	82.36%	75.98	105.53%	76.49	77.20	100.93%

Sumber: Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan atas Renstra Bappeda Litbang Tahun 2025-2029

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata capaian indikator kinerja Tahun 2025 mencapai 102.18%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja telah melampaui target, meskipun masih berada pada tahun awal periode perencanaan Renstra 2025–2029. Kondisi ini menjadi dasar evaluasi dalam menetapkan target kinerja pada tahun berikutnya melalui perjanjian kinerja, agar lebih terukur, realistis, dan tetap mendorong peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) yang merupakan indikator tujuan dalam Renstra Tahun 2025–2029 mulai dihitung pada tahun 2024, sehingga tidak tersedia data pada tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan untuk indikator Nilai AKIP Kota Balikpapan komponen perencanaan kinerja dan Nilai AKIP Kota Balikpapan komponen pengukuran kinerja tidak terdapat capaian pada tahun 2022 karena pada tahun tersebut terdapat perubahan dalam perhitungan capaian nilai AKIP. Hal ini dikarenakan terbitnya peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana terdapat perubahan bobot komponen, sub komponen dan kriteria penilaiannya.

3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Bappeda Litbang Tahun 2021-2026

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir Renstra 2026	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	$7=6/5*100$	8	$9=6/8*100$
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja	Nilai	56.27	43.36	77.06%	56.28	77.04%
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui penelitian, pengembangan dan inovasi	Indeks inovasi daerah	Indeks	64.00	60.92	95.19%	65.00	93.72%
3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP Bappeda Litbang	Nilai	-	77.20	-	-	-

Sumber: Data diolah Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa pada sasaran 1 capaiannya sebesar 77.04% jika di bandingkan dengan target akhir Renstra (2026). Hal ini terlihat masih jauh dari target, namun dapat dijelaskan bahwa terjadi perubahan bobot penilaian dan pengurangan satu komponen pada indikator sasaran ini, Sehingga antara realisasi 2025 dengan target akhir Renstra 2026 dapat dikatakan tidak relevan (tidak dapat disandingkan).

Sedangkan untuk sasaran 2 tingkat capaiannya sebesar 93.72% jika dibandingkan target akhir Renstra (2026). Untuk itu perlu meningkatkan strategi kinerja untuk pencapaian target kedepannya.

Pada sasaran 3 tidak dapat disandingkan, karena sasaran ini mengalami perubahan. Perubahan ini dikarenakan pengukuran indikator reformasi birokrasi tidak dilaksanakan dengan telah ditetapkannya PermenpanRB Nomor 3 Tahun 2023. Hal ini mneyebabkan terjadinya perubahan sasaran strategis yang semula Meningkatkan Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah (sebagaimana tertuang pada dokumen Renstra Tahun 2021-2026) menjadi Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain data di atas, disajikan juga perbandingan realisasi kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan sampai tahun 2025 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra periode baru, sehingga menjadi *baseline* awal bagi seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan terbaru. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai pencapaian kinerja tahunan serta menilai progres terhadap target jangka menengah yang ditetapkan untuk periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir Renstra 2029	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
			Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8 =5/7*100
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, berkelanjutan dan inovatif	Indeks perencanaan pembangunan daerah	Indeks	84.80	89.00	104.95%	86.00	103.49%
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi kinerja	Nilai AKIP Kota Balikpapan komponen perencanaan kinerja	Nilai	22.77	22.80	100.13%	23.08	98.79%
	Nilai AKIP Kota Balikpapan komponen pengukuran kinerja	Nilai	20.58	20.56	109.62%	20.89	107.99%
Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks inovasi daerah	Indeks	58.01	60.92	105.02%	61.52	99.02%
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	76.49	77.20	100.93%	80.00	96.50%

Sumber: Data diolah Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa pada indikator tujuan capaiannya sebesar 103.49% jika di bandingkan dengan target akhir Renstra (2029). Capaian tersebut terlihat sudah melampaui target, padahal masih pada awal periode Renstra. Hal ini dikarenakan saat penetapan target tahunan pada Renstra Tahun 2025-2029 menggunakan data realisasi tahun 2024 sebagai baseline perhitungan penetapan target tahun-tahun selanjutnya. Namun saat penetapan perjanjian kinerja, penetapan target disesuaikan dengan realisasi/capaian tahun sebelumnya.

Pada Sasaran 1 terdapat dua indikator, yaitu Nilai AKIP Kota Balikpapan komponen perencanaan kinerja dan komponen pengukuran kinerja. Capaian komponen perencanaan kinerja sebesar 98.79% dibandingkan target akhir Renstra, yang berarti hampir mencapai target meskipun masih pada awal periode. Hal ini karena penetapan target menggunakan realisasi tahun 2024 sebagai baseline.

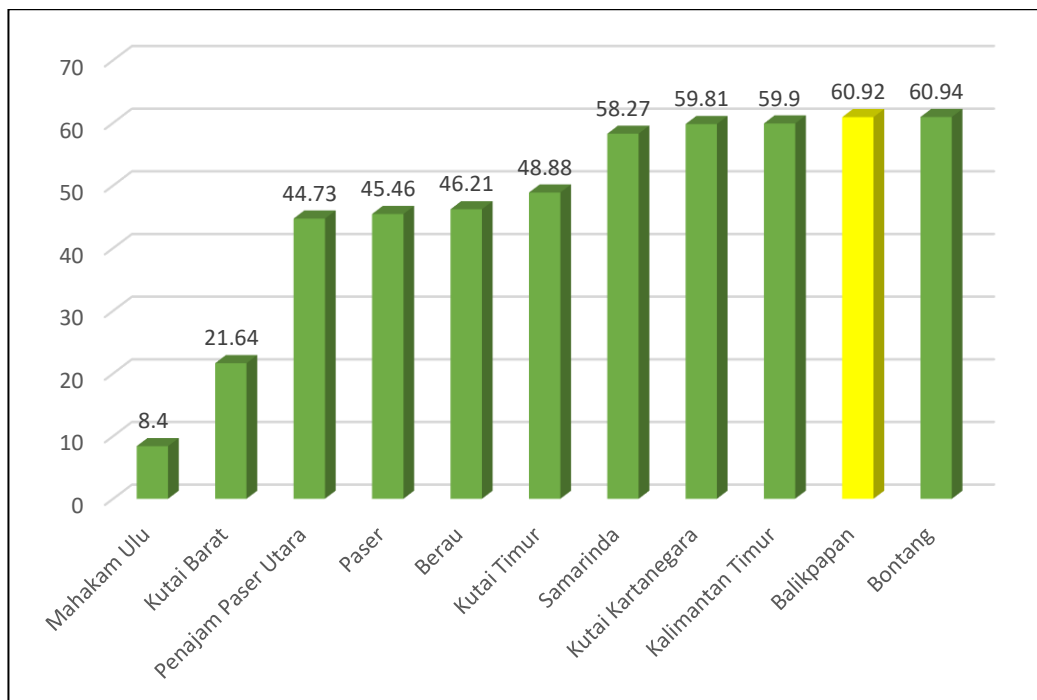
Sementara itu, capaian komponen pengukuran kinerja mencapai 107.99% dari target akhir Renstra, menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Peningkatan ini didukung oleh optimalisasi penerapan dan pengembangan aplikasi REAKSI sebagai sistem terintegrasi pelaporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Sedangkan untuk sasaran 2 tingkat capaiannya sebesar 99.02% jika dibandingkan target akhir Renstra (2029). Capaian tersebut terlihat sudah hampir mencapai target, padahal masih pada awal periode Renstra. Hal ini dikarenakan saat penetapan target tahunan pada Renstra Tahun 2025-2029 menggunakan data realisasi tahun 2024 sebagai *baseline* perhitungan penetapan target tahun-tahun selanjutnya. Namun saat penetapan perjanjian kinerja, penetapan target disesuaikan dengan realisasi/capaian tahun sebelumnya.

Pada sasaran 3 tingkat capaiannya sebesar 96.50% jika dibandingkan target akhir Renstra (2029). Capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik, di mana realisasi indikator kinerja telah hampir mencapai target akhir tahun 2029. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan strategi yang ditetapkan telah tepat sasaran dan diimplementasikan secara efektif sejak awal periode, serta menjadi fondasi yang kuat bagi pencapaian sasaran strategis pada tahun-tahun berikutnya.

3.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM/ Standar Nasional/Internasional (*Benchmark Kinerja*)

Bappeda Litbang Kota Balikpapan tidak secara langsung mengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun standar nasional/standar internasional, sehingga tidak ada indikator kinerja yang dapat disandingkan pada level tersebut. Namun untuk mengukur posisi capaian kinerja indikator pada Indeks Inovasi Daerah dan nilai AKIP Bappeda Litbang Kota Balikpapan, nilainya dapat dibandingkan dengan nilai yang diperoleh Provinsi Kalimantan Timur maupun nilai yang diperoleh kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Perbandingan ini bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai tingkat kinerja yang telah dicapai serta sejauh mana kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan berada pada level yang sebanding atau mendekati praktik baik yang berlaku pada level di atasnya. Perbandingan tersebut tersaji pada gambar di bawah ini:

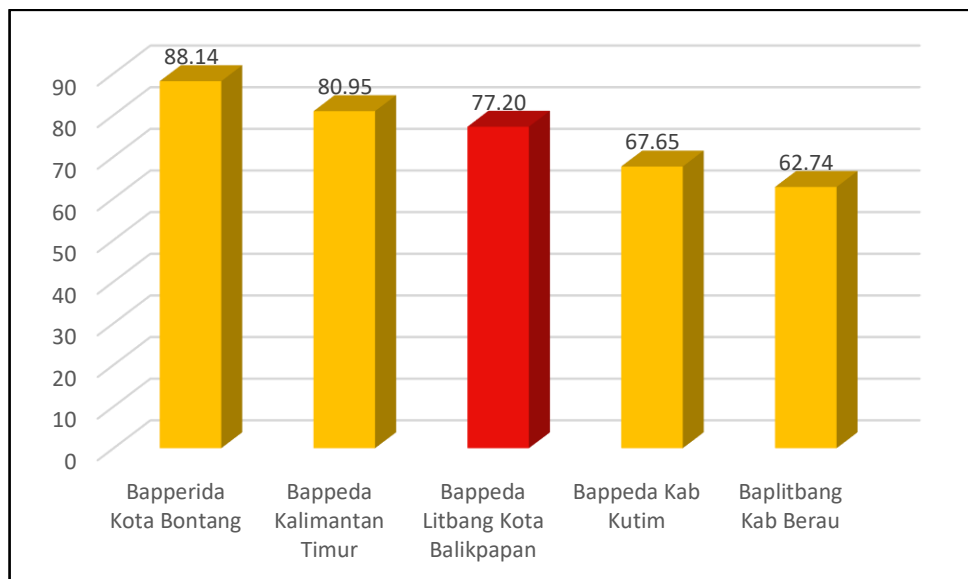


Gambar 3.3
Nilai indeks inovasi daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur

Sumber: SK Mendagri Nomor 400.10.11-6097 Tahun 2025
Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2025

Berdasarkan gambar di atas, nilai indeks inovasi Kota Balikpapan menempati urutan ke dua jika dibandingkan dengan kota yang ada di Kalimantan Timur yaitu Kota Samarinda dan Kota Bontang. Begitu pula jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Apabila dibandingkan dengan nilai indeks inovasi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan memperoleh nilai lebih tinggi sebesar 1.02 point.

Adapun perbandingan Nilai AKIP Bappeda Litbang disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.4
Nilai AKIP Bappeda Litbang pada beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: Bagian Organisasi Sertdakot Balikpapan

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai AKIP tertinggi diperoleh Bapperida Kota Bontang sebesar 88.14, diikuti Bappeda Kalimantan Timur sebesar 80.95. Bappeda Litbang Kota Balikpapan memperoleh nilai 77.20, berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur dengan selisih 3.75 poin dan tertinggal 10.94 poin dari Kota Bontang. Namun demikian, nilai Balikpapan masih lebih tinggi dibandingkan Bappeda Kabupaten Kutai Timur (67.65) dan Baplitbang Kabupaten Berau (62.74). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja akuntabilitas Bappeda Litbang Kota Balikpapan berada pada kategori menengah—cukup

kompetitif, tetapi masih memerlukan peningkatan untuk menyamai capaian Kota Bontang dan Provinsi Kalimantan Timur. Penyandingan hanya dapat dilakukan dengan beberapa kota dan kabupaten tersebut karena data yang tersedia dan dapat diperoleh terbatas pada daerah-daerah tersebut saja.

3.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2025 terdapat beberapa keberhasilan dan kegagalan yang harus di evaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya. Untuk menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.10
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=5/6*100	8	9	10
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, berkelanjutan dan inovatif	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Renstra Tahun 2025-2029	Indeks	84.80	89.00	104.95%	Adanya keterhubungan yang kuat antara perencanaan pembangunan daerah, sasaran prioritas, dan kinerja perangkat daerah sehingga pelaksanaan program selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kota Balikpapan. Komponen keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja memperoleh nilai 10 dari bobot 10, dengan proporsi 100% terhadap bobot dan 11.24% terhadap jumlah nilai IPPD.	1. Mengidentifikasi keselarasan antara perencanaan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah karena pada tahun 2025 nilai untuk komponen sinergi memperoleh nilai 22.5 dari total bobot 32, sehingga proporsi nilai terhadap bobot mencapai 70.31% dan proporsi terhadap jumlah nilai sebesar 26.16%. 2. Merumuskan rekomendasi strategis untuk perangkat daerah dengan delapan perangkat daerah sampel. Sampel dipilih secara representatif dari berbagai kategori perangkat daerah, yakni sekretariat, dinas teknis, badan perencana dan pengawas, serta kecamatan. Melalui sampel ini dapat ditelusuri bagaimana program-program prioritas yang dijalankan perangkat daerah selaras dengan target RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah.	1. Perkuat mekanisme penetapan target berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat. Target program hendaknya tidak hanya mengikuti pola administratif, tetapi mencerminkan urgensi pembangunan di lapangan. Perangkat daerah perlu menggunakan data sektoral dan spasial untuk memastikan prioritas lebih seimbang. 2. Integrasi lintas perangkat daerah melalui program tematik. Isu-isu seperti kebudayaan, keanekaragaman hayati, transportasi, dan pemberdayaan masyarakat tidak dapat ditangani oleh satu perangkat daerah saja. Perlu forum perencanaan terpadu yang melahirkan program bersama lintas perangkat daerah. 3. Reposisi prioritas pembangunan di sektor-sektor yang masih terabaikan. Program dengan target rendah seperti pelestarian budaya, pengelolaan keanekaragaman hayati, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan perlu dinaikkan statusnya agar sejalan dengan program teknis. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan pembangunan yang inklusif. 4. Perkuat sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital. Banyak target tinggi yang tercapai secara administratif, tetapi belum terukur dampak nyatanya. Sistem monitoring berbasis data digital, yang menghubungkan IKU RPJMD dengan IKU perangkat daerah, dapat membantu memastikan capaian benar-benar berdampak.

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=5/6*100	8	9	10
									5. Membangun pola kolaborasi berkelanjutan antar perangkat daerah. Saat ini koordinasi cenderung terjadi di tahap evaluasi, bukan sejak perencanaan. Dengan membangun pola kolaborasi sejak tahap penyusunan program, maka disparitas capaian antar perangkat daerah dapat ditekan, dan pembangunan daerah menjadi lebih sinkron.
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja	Renstra Tahun 2021-2026	Nilai	43.87	43.36	98.84%	1. Belum tercapainya nilai AKIP Komponen pengukuran kinerja karena beberapa perangkat daerah masih belum melakukan penyesuaian atas hasil capaian target tahun sebelumnya 2. Aplikasi REAKSI yang merupakan wadah untuk melakukan monitoring kinerja perangkat daerah, belum diimplementasikan secara maksimal dan berakala oleh seluruh perangkat daerah untuk menjadi pengawasan pengukuran kinerja PD	1. Peningkatan kualitas dan pengembangan fitur aplikasi REAKSI sebagai pendukung perencanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja sehingga membantu mempercepat proses penyusunan dokumen dan meminimalkan kesalahan administrasi 2. Melaksanakan evaluasi kinerja dengan menggunakan data dan analisis berbasis bukti (<i>evidence</i>) yang terintegrasi pada aplikasi REAKSI	1. Melakukan revidu dan perbaikan terhadap sasaran/tujuan strategis yang ada pada dokumen perencanaan baik pada level Pemerintah Kota Balikpapan maupun pada level perangkat daerah agar sesuai dengan level jenjangnya masing-masing 2. Melakukan revidu atas perjanjian kinerja Wali Kota utamanya pada sasaran strategis yang masih bisa disesuaikan agar menjadi <i>ultimate outcome</i> pada level Wali Kota, dan mana yang dapat menjadi sasaran strategis level perangkat daerah 3. Melakukan revidu pada perjanjian kinerja perangkat daerah yang realisasi kinerjanya mencapai target di atas 100% beberapa tahun berturut-turut agar dapat memperbaiki target kinerja pada tahun selanjutnya, agar menjadikan <i>baseline</i> capaian target sebelumnya untuk menjadi perencanaan kinerja tahun depan 4. Pengukuran kinerja melalui sistem informasi yang sudah dibangun agar diimplementasikan oleh seluruh perangkat daerah, agar dapat dipantau monitoring dan evaluasi kinerja masing-masing perangkat daerah oleh baik Inspektorat, Bappeda Litbang dan Bagian Organisasi agar menumbuhkan budaya kinerja baik yang bertujuan agar dapat mencapai kinerja maksimal yang telah direncanakan.
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi kinerja	Nilai AKIP Kota Balikpapan komponen perencanaan kinerja	Renstra Tahun 2025-2029	Nilai	22.77	22.80	100.13%			
	Nilai AKIP Kota Balikpapan komponen pengukuran kinerja	Renstra Tahun 2025-2029	Nilai	20.58	22.56	99.90%			

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=5/6*100	8	9	10
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui penelitian, pengembangan dan inovasi	Indeks inovasi daerah	Renstra Tahun 2021-2026	Indeks	58.01	60.92	105.02%	1. Peningkatan minat keikutsertaan peserta/inovator 2. Meningkatnya tingkat kematangan inovasi yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendagri 3. Adanya pedoman umum yang memberikan panduan operasional yang jelas dalam pengukuran indeks inovasi daerah 4. Waktu penginputan data yang cukup panjang	1. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelaksanaan bimbingan teknis 27 orang inovator dan PIC 2. Koordinasi dan kolaborasi yang baik semua pihak dalam memastikan kelengkapan data yang diperlukan dalam penilaian indeks inovasi daerah 3. Pelaksanaan lomba kreativitas dan inovasi (KRENOVA) yang diikuti 75 inovasi dari unsur pelajar, mahasiswa, dosen/akademisi, masyarakat umum dan perangkat daerah. 4. Rapat kerja dan evaluasi capaian inovasi	1. Dukungan kebijakan dari kepala daerah 2. Pengembangan aplikasi Rumah Inovasiku 3. Menerapkan mekanisme penghargaan, insentif, dan tindak lanjut berbasis evaluasi IID untuk menumbuhkan budaya inovasi yang berkelanjutan dan berbasis hasil
Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks inovasi daerah	Renstra Tahun 2025-2029	Indeks	58.01	60.92	105.02%			
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP Bappeda Litbang	Renstra Tahun 2021-2026	Nilai	76.49	77.20	100.93%	1. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal 2. Penguatan internalisasi nilai-nilai AKIP kepada 39 orang	1. Melaksanakan evaluasi berkelanjutan secara bertahap dalam menindaklanjuti rekomendasi AKIP 2. Melakukan survei pada seluruh pegawai untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kepedulian, serta komitmen dalam mencapai kinerja	1. Keterlibatan AKIP dalam penetapan rumusan/indikator/target dalam dokumen perencanaan 2. mengupdate SOP yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja 3. Integrasi AKIP dengan manajemen risiko dan inovasi daerah

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=5/6*100	8	9	10
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Renstra Tahun 2025- 2029	Nilai	76.49	77.20	100.93%	(seluruh pegawai) Bappeda Litbang secara berkelanjutan 3. Komitmen pimpinan dan penguatan budaya kinerja	yang telah direncanakan guna pemanfaatan hasil perencanaan kinerja secara berkesinambungan. Hasil survei pegawai tentang tingkat pemahaman dan kepedulian atas hasil pengukuran kinerja di peroleh hasil rata-rata sebesar 85.76% dan hasil survei pegawai tentang tingkat kepedulian terhadap informasi dalam laporan kinerja diperoleh hasil rata-rata sebesar 85.26%. 3. Melakukan pengukuran dan pelaporan kinerja secara berkala 4. Keterlibatan seluruh pegawai dalam penyusunan dokumen laporan AKIP	

Sumber: Data diolah Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025

3.2.6. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Berikut disajikan analisis keterkaitan antara capaian kinerja perangkat daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja, baik yang berhasil mendukung pencapaian target maupun yang belum optimal. Mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 menuju Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, maka analisis disusun dengan memperhatikan perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut, tanpa menyamakan indikator yang berbeda, serta difokuskan untuk menunjukkan kontribusi dan kesinambungan program dan kegiatan yang bersifat berkelanjutan dalam mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

Tabel 3.11
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja pada Masa Transisi Renstra

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Kinerja	
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, berkelanjutan dan inovatif	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	104.95 %					
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja	98.84%	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi kinerja	Nilai AKIP Kota Balikpapan komponen pengukuran kinerja	100.13%	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	20.58	22.56	109.62%
				Nilai AKIP Kota Balikpapan komponen perencanaan kinerja	99.90%	Kegiatan Penyusunan perencanaan dan pendanaan	Indeks kualitas perencanaan aspek proses	1.92	1.92	100%

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Kinerja	
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Kegiatan Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Persentase dokumen analisis data yang mendukung instrumen perencanaan	100%	100%	100%
						Kegiatan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Indeks kualitas perencanaan aspek jaminan tindak lanjut	3.06	3.06	100%
						Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23.48	22.80	100.13%

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Kinerja	
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	100%
						Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	100%	100%

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Kinerja	
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	105.02%	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks inovasi daerah	105.02%	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
						Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Kinerja	
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
						Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
						Kegiatan Pengembangan inovasi dan teknologi	Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang difasilitasi	4	4	100%

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Kinerja	
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP Bappeda Litbang	100.93%	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	100.93%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	85.65	85.71	100.07%
						Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.65	85.77	100.14%
						Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	IKM layanan administrasi keuangan perangkat daerah	85.90	86.74	100.98%
						Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	IKM layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	83.65	85.91	102.70%

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Kinerja	
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	IKM layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	82.15	84.73	103.14%
						Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	IKM layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	85.60	86.04	100.51%
						Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	IKM layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	81.20	84.52	104.09%

Sumber: Data diolah Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025

Tabel di atas menyajikan data keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan pada Tahun 2025 berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Penyajian ini disusun dengan mengacu pada Renstra tahun 2021–2026 dan Renstra tahun 2025–2029 karena tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan. Perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut merupakan konsekuensi penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan, sementara program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian kinerja lintas periode perencanaan. Selain itu, salah satu perbedaan yang mendasar terletak pada tujuan organisasi yang diukur dan dituangkan ke dalam perjanjian kinerja sejak tahun awal periode Renstra tahun 2025–2029.

Berikut diuraikan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja pada setiap sasaran strategis, yaitu:

Sasaran Strategis I

Sasaran strategis pertama adalah meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif, dan spasial. Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja berupa nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Pada Tahun 2025, pengukuran sasaran tersebut mengacu pada Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 dengan capaian sebesar 100%.

Selanjutnya pada Renstra Bappeda Litbang Tahun 2025–2029, sasaran strategis yang pertama adalah meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi kinerja diukur melalui dua indikator kinerja, yaitu Nilai AKIP Kota Balikpapan pada komponen perencanaan kinerja dengan capaian sebesar 99.90% dan Nilai AKIP Kota Balikpapan pada komponen pengukuran kinerja dengan capaian sebesar 100.13 %. Nilai tersebut adalah capaian pada tahun 2025 yang merupakan tahun awal periode Renstra tahun 2025-2029. Pencapaian tersebut didukung melalui dua program yaitu:

I. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

dengan kegiatan yang berdampak pada pencapaian target diantaranya:

1. Kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Balikpapan

Pada Tahun 2025, Bappedalitbang Kota Balikpapan telah melaksanakan penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu:

- 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2026;
- 2) Dokumen perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025; dan
- 3) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025–2029.

Seluruh dokumen perencanaan tersebut telah disusun secara sistematis, tepat waktu, dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses penyusunannya, dokumen perencanaan dimaksud disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan dokumen perencanaan di atasnya, yaitu RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029, RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, serta memperhatikan Program Prioritas Nasional, termasuk arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan Asta Cita. Hal ini dilakukan untuk memastikan terwujudnya keselarasan, keterpaduan, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.

Selain itu, penyusunan dokumen perencanaan juga memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan pendanaan, sehingga dokumen yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan administrasi, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas proses perencanaan dan pencapaian target pembangunan daerah secara efektif dan terukur.

- b. Penguatan keterpaduan proses perencanaan melalui penerapan konsep HITS (Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial)

Dalam rangka meningkatkan kualitas proses perencanaan pembangunan daerah, Bappedalitbang Kota Balikpapan pada Tahun 2025 telah menerapkan konsep HITS (Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial) dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan. Penerapan konsep tersebut dilakukan dengan memastikan keterkaitan antar sektor, keselarasan dengan tema dan prioritas pembangunan daerah, serta kesesuaian dengan kondisi dan kebutuhan wilayah.

Sebagai wujud implementasi konsep HITS, Bappedalitbang melaksanakan empat Focus Group Discussion (FGD) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari rangkaian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Balikpapan dalam rangka Penyusunan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026, yaitu:

- 1) FGD Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2026, yang bertujuan untuk menyelaraskan arah kebijakan fiskal daerah dengan prioritas pembangunan serta memastikan keberlanjutan pendanaan program dan kegiatan.
- 2) FGD Menuju Kota Global yang Inklusif, yang membahas penguatan daya saing daerah dengan tetap menjamin prinsip inklusivitas dalam pembangunan.
- 3) FGD Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Kerakyatan, yang difokuskan pada perumusan kebijakan dan program yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan.
- 4) FGD Kewilayahan, yang menekankan pendekatan spasial dalam perencanaan pembangunan untuk memastikan kesesuaian antara program dan karakteristik wilayah.

Pelaksanaan FGD tersebut melibatkan perangkat daerah terkait, perwakilan masyarakat, termasuk Forum Anak dan Forum Disabilitas, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif dan inklusif. Melalui forum-forum tersebut, dilakukan pengayaan substansi perencanaan, penyelarasan isu strategis lintas sektor, serta penajaman tema dan prioritas pembangunan daerah.

Dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut, proses perencanaan pembangunan daerah pada Tahun 2025 telah mampu mengintegrasikan pendekatan holistik, tematik, dan spasial secara lebih optimal, sehingga mendukung

peningkatan Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Proses serta tercapainya target kinerja Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

- c. Fasilitasi dan pendampingan perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026, Bappedalitbang Kota Balikpapan telah melaksanakan fasilitasi dan pendampingan secara intensif kepada seluruh perangkat daerah, guna memastikan kualitas, keselarasan, dan kepatuhan dokumen perencanaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Pendampingan tersebut dilaksanakan melalui beberapa kali desk pendampingan teknis, yang difokuskan pada penajaman substansi perencanaan, keselarasan tujuan dan sasaran, ketepatan indikator kinerja, serta konsistensi antara program, kegiatan, dan pendanaan. Adapun desk pendampingan yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) Desk Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026, untuk memastikan kesesuaian Renja Perangkat Daerah dengan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026 serta prioritas pembangunan daerah.
- 2) Desk Pendampingan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 melalui aplikasi SIPD-RI Bangda, dalam rangka penyelarasan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029, termasuk keterkaitan indikator kinerja dan target pembangunan jangka menengah.

Selain pendampingan teknis, Bappedalitbang Kota Balikpapan juga melaksanakan fasilitasi penyusunan regulasi dan kelembagaan perencanaan sebagai dasar penetapan dan legalisasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah, yang meliputi:

- a) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Renja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- b) Fasilitasi Penyusunan Surat Keputusan tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025;

- c) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029; dan
- d) Fasilitasi Penyusunan Surat Keputusan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah, sebagai dasar pembentukan tim dan penjaminan keterlibatan lintas fungsi dalam proses penyusunan Renstra.

Melalui pelaksanaan desk pendampingan dan fasilitasi tersebut, Bappedalitbang Kota Balikpapan berperan aktif dalam menjaga konsistensi, keterpaduan, dan kualitas proses perencanaan pembangunan daerah, sehingga dokumen perencanaan yang dihasilkan lebih terarah, terukur, dan selaras dengan dokumen perencanaan daerah maupun nasional.

- d. Pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan daerah secara partisipatif dan berjenjang

Mulai dari Musrenbang kelurahan, kecamatan, hingga kota, termasuk penelaahan dan sinkronisasi usulan masyarakat dan pemangku kepentingan dengan prioritas pembangunan daerah.



2. Kegiatan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah

a. Penyusunan dokumen analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Kota Balikpapan Tahun 2025

Penyusunan dokumen analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah kota balikpapan tahun 2025 dilaksanakan sebagai landasan teknokratis untuk mendukung penyusunan RPJMD 2025–2029. Kegiatan ini mencakup pengumpulan data dari berbagai sumber seperti SIDATABANGDA, P3KE, DTKS, SEPAKAT, DSSD/E-Walidata, serta publikasi BPS. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Balikpapan melalui Bappeda Litbang bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB). Metodologi yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini meliputi tahapan pengumpulan data, pembersihan data untuk menjamin konsistensi, pengolahan dengan perangkat analisis (Excel, Tableau, Python, SPSS), serta validasi melalui diskusi dengan pemangku kepentingan. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif, spasial, dan multidimensi, menggunakan kriteria fakir miskin dari Kepmensos 262/HUK/2022 serta 14 indikator kemiskinan BPS. Data yang dihasilkan kemudian dipetakan terhadap urusan pemerintahan, program prioritas RPJMD/RPJMN, dan kebutuhan anggaran berbasis SSH, sehingga rekomendasi kebijakan yang disusun bersifat berbasis bukti, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan metodologi ini, dokumen analisis tidak hanya menjadi referensi teknis, tetapi juga instrumen strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Balikpapan.

Tabel berikut menunjukkan realisasi capaian kinerja tahun 2025:

Tabel 3.12
Realisasi Capaian Kinerja Berdasarkan Jenis Dokumen

Jenis Dokumen Analisis	Jumlah Target	Jumlah Realisasi	Persentase Capaian	Status
Analisis Demografi	5	5	100%	Tercapai
Analisis Ekonomi	4	4	100%	Tercapai
Analisis Sosial	3	3	100%	Tercapai
Analisis Infrastruktur	4	4	100%	Tercapai
Analisis Lingkungan	3	3	100%	Tercapai
Total	19	19	100%	Tercapai

Sumber: Dokumen Analisis Data Kota Balikpapan

Bukti pendukung capaian kinerja 100% ini disajikan dalam grafik capaian kinerja dokumen analisis data dan dokumen antara lain:

- a) Dokumen analisis demografi telah diintegrasikan dalam penyusunan RKPD 2026, khususnya dalam bab kondisi sosial demografi dan proyeksi kebutuhan pelayanan dasar
- b) Dokumen analisis ekonomi menjadi rujukan utama dalam penentuan prioritas pembangunan ekonomi daerah yang tercantum dalam RPJMD
- c) Dokumen analisis sosial memberikan masukan substantif untuk penyusunan program penanggulangan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan
- d) Dokumen analisis infrastruktur menjadi dasar perencanaan pengembangan jaringan jalan, air bersih, dan sarana prasarana lainnya
- e) Dokumen analisis lingkungan mendukung penyusunan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan perubahan iklim.



b. Penyusunan Buku Profil Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025

Penyusunan profil pembangunan kota Balikpapan tahun 2025 dilaksanakan melalui survei literatur terhadap dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Balikpapan Dalam Angka, dilanjutkan dengan diskusi bersama stakeholder untuk mengklarifikasi kebutuhan data. Tahap berikutnya adalah survei lapangan yang mencakup pengamatan langsung kondisi infrastruktur, kesehatan, lingkungan hidup, dan pariwisata, serta dokumentasi visual melalui fotografer. Data yang terkumpul kemudian diolah dalam bentuk visualisasi statistik berupa grafik, tabel, dan peta, sehingga informasi lebih mudah dipahami. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Balikpapan melalui Bappedalitbang bekerjasama dengan Institut Teknologi Kalimantan (ITK).

Metodologi yang digunakan bersifat integratif dan partisipatif, menggabungkan data sekunder dari dokumen resmi dengan data primer hasil survei lapangan. Analisis dilakukan secara kuantitatif melalui pengolahan indikator makro (demografi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan) dan kualitatif melalui masukan stakeholder. Visualisasi data bilingual (Indonesia–Inggris) memperkuat daya tarik publikasi ini sebagai instrumen kebijakan sekaligus media promosi investasi. Dengan pendekatan ini, profil pembangunan tidak hanya menjadi laporan capaian, tetapi juga alat strategis untuk perencanaan jangka panjang, pengambilan keputusan berbasis bukti, dan peningkatan transparansi pembangunan daerah.

Realisasi capaian kinerja Penyusunan Buku Profil Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 mencapai 100 %.

Buku Profil Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 dapat diakses publik melalui web resmi Bappedalitbang Kota Balikpapan. (<https://bappeda.balikpapan.go.id/content/2528/profil-pembangunan>).



3. Kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah

a. Desk evaluasi Renja perangkat daerah tahun 2024 dan capaian kinerja

Kegiatan desk evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan desk ini dikoordinasikan oleh Bidang Pengendalian, Pembiayaan dan Pelaporan (PPP) Bappeda Litbang yang bekerja sama dengan Bidang Pengembangan Infrastruktur Perekonomian Perkotaan (PIPP) serta Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur (KRA). Pelaksanaan desk bertujuan untuk melakukan diskusi, pendalaman informasi, serta konfirmasi capaian kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 terhadap target kinerja yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024, yang meliputi capaian Sub Kegiatan, Kegiatan, Program, dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah.

Kegiatan desk evaluasi dihadiri oleh Sekretaris Perangkat Daerah, Kepala Bidang, serta pejabat struktural maupun pejabat fungsional yang membidangi urusan perencanaan pada masing-masing Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaannya, Perangkat Daerah menyampaikan paparan terkait capaian kinerja yang telah direalisasikan, faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian target, serta kendala dan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program dan kegiatan. Penyampaian informasi tersebut didukung dengan data dan dokumen realisasi kinerja sebagai bahan verifikasi dan analisis.

Berdasarkan hasil pelaksanaan desk evaluasi tersebut, Bappeda Litbang melalui Bidang PIPP dan Bidang KRA menyusun catatan hasil evaluasi serta rekomendasi perbaikan yang akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan pada periode selanjutnya. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara lebih optimal dan terukur.



b. Desk Evaluasi Renja PD Triwulan 1 Tahun 2025

Kegiatan desk dilaksanakan sebagai bagian dari proses pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah pada Triwulan I Tahun 2025. Kegiatan desk ini bertujuan untuk mengkonfirmasi tingkat pencapaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Desk evaluasi ini dihadiri oleh Sekretaris Perangkat Daerah beserta seluruh perwakilan bidang pada masing-masing Perangkat Daerah, sehingga proses evaluasi dapat dilakukan secara menyeluruh, akurat, dan berbasis data.

Pelaksanaan desk evaluasi ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan Triwulan I, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran melalui penyelarasan antara capaian kinerja dengan kebutuhan pembangunan daerah yang bersifat dinamis.

Hasil dari pelaksanaan desk evaluasi ini berupa verifikasi data capaian kinerja, identifikasi deviasi antara target dan realisasi, serta rumusan rekomendasi tindak lanjut yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Dengan adanya desk evaluasi ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah dapat menjadi lebih terarah, adaptif, dan akuntabel, serta mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara optimal.

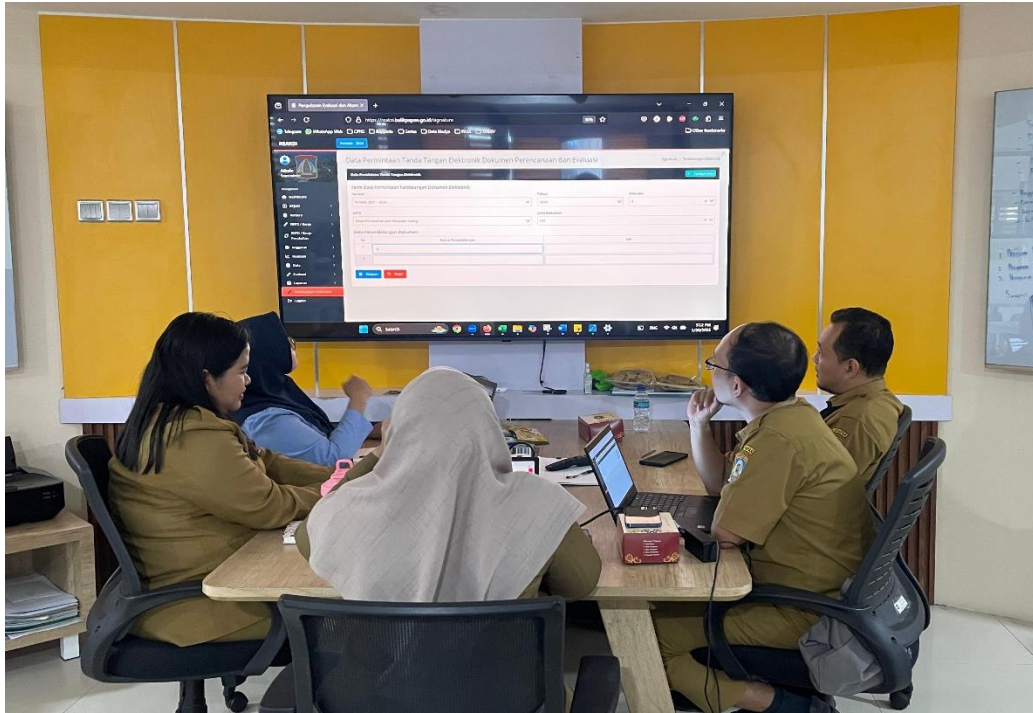


c. Rapat dan koordinasi pengembangan aplikasi REAKSI

Kegiatan tersebut dilakukan bersama Dinas Komunikasi dan Informatika serta Bagian Organisasi dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kualitas sistem informasi perencanaan, pelaporan, dan evaluasi pembangunan daerah yang terintegrasi mengingat aplikasi REAKSI merupakan alat bantu yang digunakan untuk pelaksanaan evaluasi hasil perencanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembahasan teknis terkait pengembangan dan penyempurnaan fitur aplikasi sebagai bagian dari aksi tindak lanjut hasil evaluasi dari Tim Evaluasi SAKIP KemenpanRB sehingga dapat mendukung kebutuhan pengelolaan data perencanaan dan kinerja secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Dalam rapat koordinasi tersebut dilakukan pembahasan terkait penambahan beberapa fitur utama, antara lain pengembangan menu input data perencanaan, pelaporan, dan evaluasi yang dirancang untuk memudahkan perangkat daerah dalam melakukan pengisian data serta pemantauan capaian kinerja secara sistematis. Selain itu, dilakukan pula pengembangan tampilan dashboard yang lebih informatif dan interaktif guna menyajikan data kinerja pembangunan daerah secara komprehensif dan *real-time*, sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan pimpinan.

Pengembangan aplikasi juga mencakup penyediaan fitur informasi publik yang dapat diakses tanpa melalui proses login, sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Pengembangan fitur-fitur tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelaksanaan evaluasi perencanaan oleh Kementerian Dalam Negeri serta mendukung pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian PANRB. Dengan adanya pengembangan Aplikasi REAKSI, diharapkan pengelolaan data perencanaan dan pelaporan kinerja daerah dapat berjalan lebih terintegrasi, akurat, dan mendukung peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.



d. Sosialisasi Penguatan Kinerja Berbasis *Evidence* dalam Aplikasi REAKSI

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil (*result-based management*), penguatan kinerja berbasis *evidence* menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program dan kegiatan. Pendekatan berbasis *evidence* memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran karena didasarkan pada data dan informasi yang valid, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat sistem kinerja instansi pemerintah, dikembangkan Aplikasi REAKSI (Pengukuran Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi) sebagai instrumen pendukung dalam proses pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data kinerja. Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi wadah integrasi antara perencanaan, pelaporan, dan evaluasi berbasis bukti, sehingga menghasilkan informasi kinerja yang komprehensif dan *real-time*.

Guna memastikan pemahaman dan pemanfaatan aplikasi REAKSI secara optimal di seluruh unit kerja, diperlukan kegiatan Sosialisasi Penguatan Kinerja Berbasis *Evidence* dalam Aplikasi REAKSI. Kegiatan ini bertujuan untuk

meningkatkan kapasitas aparatur dalam memahami konsep kinerja berbasis evidence serta memberikan panduan teknis dalam penggunaan aplikasi secara efektif. Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan tercipta keseragaman pemahaman dan peningkatan kualitas pelaporan kinerja yang lebih akurat, transparan, dan berdampak nyata terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Kegiatan Sosialisasi Penguatan Kinerja Berbasis *Evidence* dalam Aplikasi REAKSI dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur dalam menerapkan prinsip kinerja berbasis evidence melalui pemanfaatan Aplikasi REAKSI. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan setiap unit kerja dapat secara konsisten mengelola data dan informasi kinerja secara sistematis, akurat, dan terintegrasi guna mendukung proses pengambilan keputusan yang berbasis data (*data-driven decision making*).

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

- 1) Meningkatkan pemahaman aparatur mengenai pentingnya budaya kinerja berbasis data dan *evidence* dalam mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan objektif;
- 2) Membangun kesadaran organisasi tentang peran data sebagai dasar dalam penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kinerja program maupun kegiatan;
- 3) Memberikan pemahaman teknis mengenai strategi peningkatan kualitas data kinerja agar lebih valid, *reliabel*, dan konsisten;
- 4) Mendorong penerapan sistem pengelolaan data kinerja yang terintegrasi dan berkesinambungan antar unit kerja;
- 5) Meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengelola, memverifikasi, dan memanfaatkan data kinerja untuk menghasilkan laporan kinerja yang akurat dan berbasis bukti;
- 6) Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel melalui implementasi budaya kerja berbasis data dan peningkatan kualitas informasi kinerja.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Bappeda Kalimantan Timur, Inspektorat Kota Balikpapan, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Dengan beberapa materi sebagai berikut:

- 1) Penguatan Budaya Kinerja Berbasis Data dan *Evidence* oleh Bapak Fryma Pratama Putra, Fungsional Perencana Bappeda Provinsi Kalimantan Timur;
- 2) Strategi Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja Pemerintah, oleh Ibu Sayektiningsih Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan;
- 3) Integrasi Manajemen Risiko ke Aplikasi REAKSI, oleh Ibu Silvia Rahmadani Inspektur Kota Balikpapan; serta
- 4) Pengenalan dan informasi menu dan fitur baru dalam aplikasi REAKSI berkaitan dengan evaluasi berbasis *evidence* oleh Bappeda Litbang dan Diskominfo Kota Balikpapan.

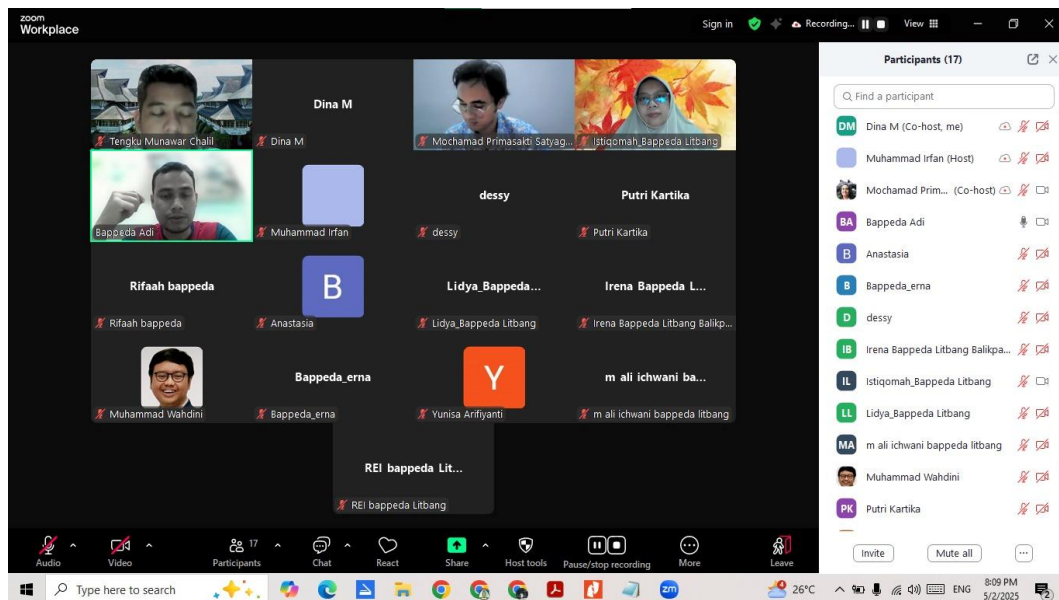
Peserta Sosialisasi adalah Pejabat/Fungsional Perencana/Kasubbag. Program dan Keuangan beserta staf yang membidangi perencanaan pada setiap Perangkat Daerah, fungsional Auditor, fungsional Analis Kebijakan Bagian Organisasi, fungsional di lingkungan Bappeda Litbang dan Tim Programmer Diskominfo dengan total peserta kurang lebih sebanyak 110 orang.



- e. Melakukan penyusunan Laporan Evaluasi Dokumen Perencanaan Tahunan yaitu:

Evaluasi RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024 Semester 2 dan RKPD Tahun 2025 Semester 1 dilaksanakan dalam rangka untuk memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Kota Balikpapan dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah Kota Balikpapan. Hal ini dikarenakan hasil capaian kinerja RKPD Kota Balikpapan yang baik tentunya akan mendukung dan mewujudkan sasaran

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan tercapai dengan baik pula serta dalam mendukung pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional. Evaluasi RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024 Semester 2 dan RKPD Tahun 2025 Semester 1 dilaksanakan setiap semester menggunakan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Kota Balikpapan yang disusun setiap triwulan. Hasil evaluasi RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025 Semester 1 menjadi bahan penyusunan Perubahan RKPD Kota Balikpapan tahun 2025.



f. Penyusunan Laporan evaluasi RPJMD Kota Balikpapan untuk periode pelaksanaan tahun 2024

Dokumen evaluasi RPJMD bertujuan untuk mengetahui pencapaian hasil pembangunan daerah berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Adapun tujuan penyusunan dokumen evaluasi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah:

- 1) Mengetahui konsistensi/keselarasan pelaksanaan program RPJMD ke RKPD dan APBD tahun 2024;
- 2) Mengetahui pencapaian target kinerja, baik indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD pada Bab V, capaian kinerja program pada Bab VII serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada Bab VIII (IKU dan IKK) beserta analisa ketercapaiannya;

- 3) Mengetahui kendala dan faktor pendorong dalam evaluasi capaian kinerja;
- 4) Merumuskan rekomendasi hasil evaluasi RPJMD dan perbaikan kebijakan pembangunan yang perlu dilakukan.

II. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan yang berdampak pada pencapaian target diantaranya:

1. Kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
 - a. Koordinasi perencanaan dengan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia:
 - 1) Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting

Sinkronisasi program antar perangkat daerah (Kesehatan, DP3AKB, Sosial) untuk mencapai target nasional melalui aksi konvergensi yang merupakan salah satu strategi yang dianggap efektif dalam upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting. Melalui aksi konvergensi, diharapkan dapat terjadi sinergi antara berbagai pelaku kepentingan di desa dan kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat, sehingga intervensi yang dilakukan dapat lebih terarah dan memberikan dampak yang lebih besar. Pada tahun 2024 Kemendagri membuat desain 8 (delapan) aksi konvergensi sebagai instrumen bagi daerah dalam pelaksanaan upaya intervensi penurunan stunting terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah dan konvergen dengan melibatkan berbagai sumber daya yang ada. Dalam pelaksanaan aksi konvergensi menggunakan indikator kinerja daerah dalam pelaksanaan intervensi percepatan penurunan stunting sebanyak 64 (enam puluh empat) indikator. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan aksi konvergensi, maka diperlukan perbaikan pelaksanaan aksi konvergensi melalui Perumusan ulang Petunjuk Teknis Aksi Konvergensi bagi Kabupaten/Kota, serta penyusunan juknis tingkat kecamatan. Aksi konvergensi perlu dilaksanakan untuk memberikan kepastian keterpaduan di bidang anggaran, maupun cakupan intervensi. Oleh karena itu Kemendagri merubah dari 8 aksi konvergensi menjadi 6 aksi konvergensi yaitu 1. Komitmen dan Visi Kepemimpinan, pilar 3. Konvergensi Program dan Kemitraan, pilar 5, Peningkatan Kapasitas, dan pilar 6. Pemantauan dan Evaluasi.

2) Sinkronisasi perencanaan layanan pendidikan dan kesehatan
penyelarasan target SPM (Standar Pelayanan Minimal) ke dalam dokumen
perencanaan tahunan.

3) Sinkronisasi program perlindungan perempuan dan anak

Memastikan pengarusutamaan gender (PUG) terakomodasi dalam dokumen perencanaan setiap perangkat daerah. hal ini dapat terlihat dari data - data yang tercantum dalam RKPD merupakan data terpilah dan setiap sub kegiatan pada perangkat daerah dilengkapi dengan *Gender Analysis Pathway* (GAP) merupakan alat analisis sistematis dan terstruktur yang digunakan dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender untuk mengidentifikasi serta mengatasi ketimpangan gender antara laki - laki dan perempuan dalam suatu program. GAP berfungsi sebagai dasar penyusunan *Gender Budget Statement* (GBS) merupakan dokumen resmi dalam perencanaan dan penganggaran yang menginformasikan bahwa suatu program/kegiatan telah responsif gender serta merinci alokasi anggaran untuk mengatasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. GBS merupakan bagian tak terpisahkan dari RKA/DPA

4) Rapat penyelarasan program literasi dan perpustakaan

mengintegrasikan budaya baca ke dalam perencanaan pembangunan manusia tingkat akar rumput.

5) Koordinasi perencanaan pengendalian penduduk

6) Asistensi perencanaan produk hukum daerah

Memastikan rencana pembentukan perda/perkada selaras dengan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD.

b. Desk Perencanaan dengan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia:

1) Bidang sumber daya manusia

- Desk sinkronisasi indikator SPM pendidikan dan Kesehatan verifikasi kesesuaian target layanan dasar dalam Renja PD dengan standar teknis kementerian.
- Desk penyelarasan program penurunan prevalensi stunting
Memastikan anggaran intervensi spesifik (Dinas Kesehatan) dan

sensitif (DP3AKB/PUPR) terkunci pada lokus desa yang sama. Langkah-langkah pelaksanaan aksi konvergensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan di koordinasi oleh Bappeda Litbang melalui isian form menggunakan web monitoring aksi.

Siklus Aksi Konvergensi Kota



- Desk verifikasi anggaran fungsi Pendidikan Memastikan alokasi minimal 20% anggaran pendidikan terpenuhi secara substansial dalam dokumen perencanaan.
- 2) Bidang pemerintahan dan aparatur:
- Desk penyelarasan pohon kinerja (cascading) organisasi: Memastikan sasaran strategis kepala daerah terurai habis ke dalam sub-kegiatan di tingkat eselon III dan IV.
 - Desk evaluasi nomenklatur program berdasarkan Kepmendagri 90/050: Verifikasi keselarasan kode rekening dan penamaan program agar sesuai dengan sistem informasi nasional (SIPD).
 - Desk perencanaan penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Menyelaraskan rencana aksi RB masing-masing PD dengan prioritas nasional (seperti digitalisasi pelayanan).
- 3) Bidang kesejahteraan rakyat:
- Desk verifikasi data sasaran penanggulangan kemiskinan: Pencocokan (matching) daftar penerima manfaat dalam dokumen perencanaan dengan data DTSEN terbaru.
 - Desk penyelarasan program pelatihan kerja berbasis klaster industry: Mengunci target jumlah lulusan pelatihan di Disnaker agar selaras dengan kebutuhan proyek strategis daerah.

- Pemetaan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas Memastikan keselarasan antara pelatihan kerja yang dilaksanakan baik oleh Dinas Ketenagakerjaan, BLKI, maupun LPK swasta dengan kebutuhan pelatihan dari lulusan SLB.
 - Desk koordinasi perlindungan pekerja rentan Verifikasi anggaran iuran Jamsostek yang dibayarkan pemerintah daerah dalam dokumen perencanaan.
- c. Rapat Evaluasi Perencanaan dengan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dilakukan pada tiap Triwulan:
- 1) Bidang urusan pendidikan
 - 2) Bidang urusan kesehatan
 - 3) Bidang urusan sosial
 - 4) Bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - 5) Bidang urusan ketenagakerjaan
 - 6) Bidang urusan kependudukan dan pencatatan sipil
 - 7) Bidang urusan pengawasan
 - 8) Bidang urusan trantibum
 - 9) Bidang urusan perencanaan
 - 10) Bidang urusan penelitian
- d. Asistensi dan Verifikasi Rancangan Awal, Rancangan, dan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia:
- 1) Bidang sumber daya manusia
 - 2) Bidang pemerintahan dan aparatur
 - 3) Bidang kesejahteraan rakyat
- e. Sinkronisasi Program Prioritas Pusat, Provinsi, dan Daerah untuk Menjamin keselarasan vertikal agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran:

- 1) Bidang sumber daya manusia
 - 2) Bidang pemerintahan dan aparatur
 - 3) Bidang kesejahteraan rakyat
- f. Penyusunan Analisis Kebutuhan Pembangunan Manusia (Human Development Analysis) sebagai Basis data untuk memastikan perencanaan berbasis bukti/evidence-based).
- g. Pengendalian dan penyelarasan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan Pemanfaatan teknologi untuk mengunci konsistensi antar dokumen):
- 1) Bidang sumber daya manusia
 - 2) Bidang pemerintahan dan aparatur
 - 3) Bidang kesejahteraan rakyat
2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
- a. Perumusan Rencana Pembangunan Daerah bidang Perekonomian dan SDA melalui penerapan konsep HITS (Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial) berupa RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026 dan RKPD Perubahan Tahun 2025 dengan substansi:
- 1) Pengembangan Pariwisata dan MICE

Koordinasi diarahkan pada penciptaan ekosistem pariwisata yang terintegrasi, di mana sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) menjadi motor penggerak kunjungan berkualitas. Bidang Perekonomian dan SDA mendorong penyelenggaraan event pariwisata dapat meningkatkan keterlibatan sumber daya lokal.
 - 2) Pengembangan Kawasan Industri

Menarik investasi melalui penyusunan peta investasi, penyedia infrastruktur dan keterlibatan Perusda sehingga keberadaan industri memberikan *multiplier effect* bagi ekonomi lokal tanpa mengabaikan daya dukung lingkungan hidup di sekitarnya.

3) Pengembangan Ekonomi Kreatif

Mendorong pengembangan 17 subsektor ekonomi kreatif dengan membangun ekosistem yang mendukung inovasi dan perlindungan hak kekayaan intelektual serta pelaksanaan event kreatif tahunan di 6 Kecamatan yang pelaksanaannya melibatkan forum ekonomi kreatif di Kota Balikpapan.

4) Pengembangan Inflasi

Terlibat dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang mengacu pada rencana aksi pengendalian investasi daerah diantaranya monitoring harga dan stok BAPOKTING, Pasar Murah, Gerak Pangan Murah, Rapat Koordinasi Distributor dan Kerjasama antar daerah.

5) Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan dilakukan dengan mengoordinasikan program peningkatan kapasitas produksi, digitalisasi pemasaran, dan kemudahan akses pembiayaan. Mendorong UMKM tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi bagian integral dari rantai pasok industri besar dan sektor pariwisata yang ada di daerah serta penyediaan fasilitas dan sentra UMKM.

6) Penguatan Ketahanan Pangan

Meningkatkan manajemen cadangan pangan daerah dan diversifikasi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan luar daerah melalui Urban Farming/P2L, analisis FSVA, Neraca Pangan dan edukasi food loss & food waste.

7) Peningkatan Ruang Terbuka Hijau

Melakukan sinkronisasi kebutuhan penyediaan RTH yang tidak hanya dilihat dari aspek estetika, tetapi juga sebagai bagian dari infrastruktur hijau yang berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan dan menyediakan ruang interaksi sosial bagi warga.

8) Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Mengintegrasikan isu lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan melalui strategi pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketangguhan wilayah terhadap bencana iklim. Koordinasi lintas sektor memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan

perlindungan sumber daya alam melalui pelaksanaan Panen Air Hujan dan *Pilot Project* efisiensi energi pada bangunan gedung.

b. Pendampingan dan asistensi perangkat daerah urusan bidang Perekonomian dan SDA dalam penyusunan dokumen perencanaan berupa Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renja Tahun 2026 dan Renja Perubahan Tahun 2025.

c. Pendampingan dan asistensi perangkat daerah urusan bidang Perekonomian dan SDA dalam evaluasi perencanaan berupa Evaluasi Renja Tahun 2024 dan Renja Tahun 2025 TW I, II dan III.

d. Perumusan permasalahan dan kebijakan perencanaan urusan bidang Perekonomian dan SDA yang antara lain berupa Pengembangan Perkotaan yang Berkelanjutan melalui Sustainable Cities Impact Program yang bertujuan memperkuat kapasitas kota dalam menyiapkan rencana pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi melalui prioritisasi investasi modal, dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kebijakan ini diarahkan untuk memberikan dampak (impact) perubahan perilaku pelaku pembangunan dalam berpikir secara holistik dan berkesinambungan dalam membangun kota dari berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup termasuk pelestarian keanekaragaman hayati sesuai dengan Kebijakan Perkotaan Nasional, Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon.

3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Kewilayahan

a. Perumusan rencana pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan melalui penerapan konsep HITS (Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial) berupa RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026 dan RKPD Perubahan Tahun 2025 dengan substansi:

1) Pelayanan air minum, air limbah dan persampahan

Memastikan keterpaduan perencanaan pelayanan air minum, air limbah, dan persampahan melalui Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan sektoral seperti RISPAM, SSK dan Master Plan Persampahan. Selain berkaitan dengan pemenuhan SPM dan target

layanan dasar, koordinasi dilakukan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan pembiayaan yang bersumber Non APBD seperti APBD, APBD Provinsi, DAK, Bantuan Keuangan, Hibah, serta okasi prioritas, serta skema pembiayaan, termasuk peluang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan wilayah. Beberapa major project yang sedang dikembangkan antara lain: SPAM Sepaku Semoi, Pembangunan Embung Aji Raden, IPLT Manggar, Pengembangan IPAL Perkotaan, Pengembangan TPAS Manggar, Pembangunan TPS Terpadu/ Pusat Daur Ulang.

2) Transportasi Publik

Menyelaraskan antara kebutuhan layanan infrastruktur jalan dan angkutan yang terintegrasi dan sesuai dengan rencana pengembangan tata ruang dan kawasan perkotaan. Koordinasi difokuskan pada keselarasan jaringan transportasi, pengembangan angkutan umum massal, integrasi moda, serta keterkaitan dengan pusat-pusat kegiatan dan permukiman. Melalui proses ini, perencanaan transportasi publik diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas, mengurangi kemacetan, serta mendukung mobilitas masyarakat secara efisien dan berkelanjutan. Beberapa major project yang sedang dikembangkan antara lain: Pembangunan Konektivitas Jalan Kawasan Balikpapan Timur, Utara dan Barat, Pengembangan Sarana Angkutan Umum Massal Balikpapan City Trans, serta Pembangunan Terminal Parkir, Depo Kontainer, Pergudangan Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor.

3) Pengendalian Banjir

Mendorong pengendalian banjir melalui Sustainable Urban Water Management yang terintegrasi antar wilayah dan antar sektor sejalan dengan rencana tata ruang dan mempertimbangkan aspek lingkungan dan perubahan iklim. Secara teknis pengendalian banjir difokuskan melalui program pembangunan drainase, pengendalian daerah aliran sungai, serta normalisasi saluran dengan lokus kewilayahan berupa DAS prioritas adalah DAS Ampal, DAS Klandasan Kecil, DAS Sepinggan dan DAS Manggar.

4) Penataan Wajah Kota

Koordinasi dilakukan untuk menyelaraskan penataan ruang terbuka hijau, koridor jalan, kawasan strategis kota, serta elemen pendukung citra kota dengan kebijakan pembangunan dan rencana tata ruang. Penataan wajah kota didorong dapat dilaksanakan dengan terintegrasi dalam beberapa kegiatan seperti penataan jalan, pembangunan drainase, penyediaan taman kota, penyediaan penerangan jalan umum dan perlengkapan jalan, pengelolaan prasarana dan sarana umum, serta penataan gedung serta bangunan lingkungan. Penataan wajah kota diharapkan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga dapat mendukung fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan perkotaan.

5) Penyelenggaraan Smart City

Melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan selaras dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan smart city. Selain melalui pembangunan infrastruktur dengan pemanfaatan teknologi informasi, juga memastikan penyelenggaraan prinsip satu data dapat terlaksana. Koordinasi ini dilaksanakan melalui penyelarasan kebijakan, program, dan indikator kinerja lintas perangkat daerah dan bertujuan meningkatkan efektivitas layanan publik, efisiensi pengelolaan kota, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pembangunan perkotaan yang cerdas dan berkelanjutan

Fokus Pembangunan 2025, yaitu:

1. Peningkatan produktivitas ekonomi dan investasi daerah;
2. Penguatan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing: percepatan Penurunan Stunting melalui Pembangunan infrastruktur air minum dan air limbah (Dinas Pekerjaan Umum)
3. Percepatan transformasi digital dan penguatan reformasi birokrasi berdampak: perluasan digitalisasi pelayanan publik (Diskominfo), Penguatan Manajemen SPBE (Diskominfo)
4. Penguatan sarana prasarana dan konektivitas perkotaan:
 - a) Pengembangan transportasi massal dan konektivitas wilayah
 - 1) Pembangunan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM)

- 2) Pembangunan Alternatif Jalan Tembus Balikpapan Regency ke Borneo Paradiso dan Bukit Batakan Permai
- 3) Jalan Akses SMP Regency-Jalan Mukmin Faisal
- 4) Pelebaran Jalan Kesatrian-Jalan Mukmin Faisal
- 5) Pembangunan Jembatan Atas Air Balikpapan Barat (Lanjutan)
- 6) Penataan Trotoar Simpang Karang Anyar-Pasar Inpres Kebun Sayur
- 7) Penataan Jl. MT Haryono dan Ahmad Yani
- 8) Pembangunan Terminal BP
- 9) Pembangunan Dermaga Paradiso
- 10) Pembangunan Terminal Angkutan Barang
- b) Penataan kawasan terintegrasi
 - 1) Penataan pasar klandasan
 - 2) Penataan kawasan pasar loak baru tengah dan parkir terminal baru tengah
 - 3) Penataan lingkungan pasir inpres kebun sayur
 - 4) Penataan jaringan utilitas dan kabel udara bawah tanah
 - 5) Pembangunan bangunan pengamanan pantai tanjung bayur teritip
 - 6) Penataan simpang rapak
 - 7) Pembangunan jogging track depan stadion Balikpapan
 - 8) Pengadaan lahan ITK
 - 9) Peningkatan sarpras pendukung olahraga prestasi sesuai DBON (Cabor akuatik & atletik)
 - 10) Penataan kawasan kumuh kelurahan Karang Rejo
 - 11) Pembangunan RTLH
- c) Penyediaan sarana prasarana sanitasi dan persampahan
 - 1) Pembangunan pusat daur ulang (PDU) graha indah, Karang Joang (lanjutan), kecamatan Balikpapan Kota dan Bank Sampah
 - 2) Optimalisasi TPA Manggar
 - 3) Peningkatan IPLT Manggar
 - 4) Perluasan layanan SPALD-S dan SPALD-T

5. Penguatan Kota Inklusif dan Berketahanan Iklim.

a) Pengendalian banjir

- 1) Pengendalian banjir balikpapan timur sekitar exit toll manggar
- 2) Pengendalian banjir drainase antasari
- 3) Pembangunan rumah pompa sungai klandasan kecil
- 4) Pembangunan bendali ampal hulu
- 5) Penanganan banjir balikpapan utara Km 17 gang motor
- 6) Penanganan banjir graha indah (tembus lapangan golf karang joang)

b) Penyediaan air minum

- 1) Penyediaan air baku: Pembebasan Embung Aji Raden
- 2) Persiapan SPAM sepaku semoi

c) Pembangunan RTH dan implementasi green infrastruktur

- 1) Penataan taman balikpapan barat (depan TK Manuntung)
- 2) Revitalisasi taman 3 generasi
- 3) Lanjutan pembangunan taman kota
- 4) Pembangunan RTH Km 7
- 5) Optimalisasi green koridor dan pohon peneduh
- 6) Pilot project green building (solar panel & PAH)
- 7) Peningkatan kapasitas masyarakat bidang lingkungan hidup
- 8) Peningkatan kapasitas masyarakat bidang lingkungan hidup

b. Pendampingan dan asistensi perangkat daerah urusan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam penyusunan dokumen perencanaan berupa Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renja Tahun 2026 dan Renja Perubahan Tahun 2025.

c. Pendampingan dan asistensi perangkat daerah urusan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam evaluasi perencanaan berupa Evaluasi Renja Tahun 2024 dan Renja Tahun 2025 TW I, II dan III.

d. Perumusan permasalahan dan kebijakan perencanaan urusan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang antara lain berupa:

1. Kolaborasi *Tri-City* (IKN-Balikpapan dan Samarinda) yang diharapkan akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional baru. Ke depan, konsep pengembangan *Tri-City* perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan masing-masing baik oleh Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, maupun Kota Samarinda.

2. Kolaborasi Pengembangan Bangunan Gedung Rendah Emisi yang merupakan inisiatif lintas sektor yang bertujuan untuk mendukung pembangunan perkotaan berkelanjutan melalui penerapan prinsip efisiensi energi, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan peningkatan kualitas lingkungan bangunan gedung. Kolaborasi ini difokuskan pada penyusunan Rencana Aksi, kerangka kebijakan, integrasi prinsip bangunan hijau dalam dokumen perencanaan daerah, serta penguatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penerapan standar bangunan gedung rendah emisi.

3. Belum meratanya kondisi jalan dalam kondisi mantap. Panjang jalan terbangun di Kota Balikpapan 518,648 Km, Jaringan jalan dalam kondisi baik sebesar 62,14% (322,279 Km) dan jalan beraspal 67,60% (350,293 Km).

4. Menurunnya kuantitas sumber air baku.

- a. Sumber air baku kurang, belum dapat dilakukan penambahan saluran rumah tangga.
- b. Jaringan pipa yang sudah tua mengakibatkan rawan kebocoran
- c. Cakupan pelayanan air minum perpipaan sebesar 78,14% pada tahun 2021

5. Kapasitas TPA yang sudah overload

- a. Pengelolaan sampah dari rumah tangga belum efektif
- b. Akibat covid-19, banyak rumah kompos dan bank sampah yang kurang aktif
- c. Pengelolaan sampah di sumbernya baru sebesar 25,80% pada tahun 2021

e. Perumusan kebijakan sesuai direktif pimpinan:

1. Bappeda Litbang Kota Balikpapan sebagai simpul KPBU sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor: 188.45-114/2024 tentang

Penunjukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kota Balikpapan Sebagai Simpul Kerjasama Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur telah berkoordinasi dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan mengenai kelanjutan Proyek KPBU TPAS Manggar. Telah dilakukan audiensi kepada Wali Kota Balikpapan dan DPRD Kota Balikpapan mengenai perkembangan proyek KPBU TPA Sampah Manggar.

2. Bappeda Litbang Kota Balikpapan telah berkoordinasi dengan Direktorat Sanitasi Kementerian PUPR, BPPW Kalimantan Timur, Kemitraan Indonesia Australia Untuk Infrastruktur (KIAT), BKAD, DPU, DLH, DKUMKMP, dan PTMB mengenai Penyusunan Dokumen Perencanaan IPAL Kota Balikpapan. Adapun lokasi proyek utama di Balikpapan yaitu IPAL Margasari, IPAL Somber, dan IPAL Perusda atau Sepinggian. Dokumen Perencanaan ini mencakup Studi Kelayakan, Desain Teknik dasar IPAL, dan Desain Rekayasa Jaringan Air Limbah.

3. Bappeda Litbang berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas, JICA untuk kolaborasi *Tri-City* yang diharapkan akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional baru. Ke depan, konsep pengembangan *Tri-City* perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan masing-masing baik oleh Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, maupun Kota Samarinda.

Sasaran Strategis II

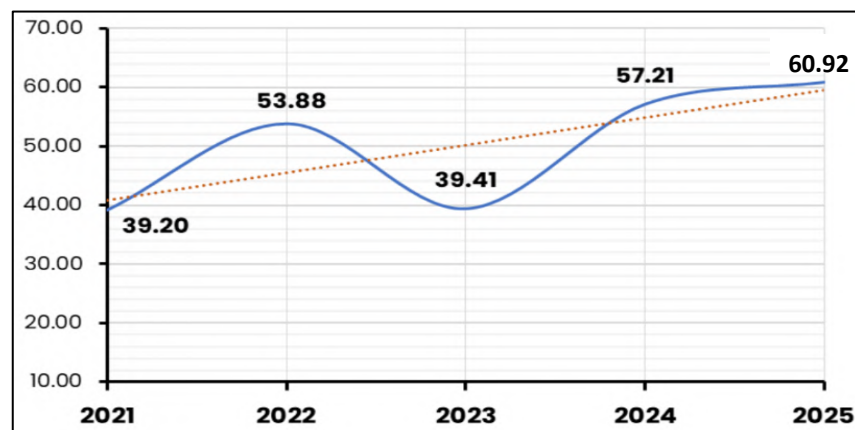
Sasaran strategis kedua adalah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah. Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja berupa Indeks inovasi daerah. Pada Tahun 2025, pengukuran sasaran tersebut mengacu pada Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 dengan capaian sebesar 105.02%.

Selanjutnya pada Renstra Bappeda Litbang Tahun 2025–2029, sasaran strategis yang kedua adalah Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam

mendukung pembangunan daerah yang diukur melalui indikator kinerja, yaitu Indeks inovasi daerah dengan capaian sebesar 105.02%. Nilai tersebut adalah capaian pada tahun 2025 yang merupakan tahun awal periode Renstra tahun 2025-2029. Pencapaian tersebut didukung melalui program program penelitian dan pengembangan daerah dengan kegiatan yang berdampak pada pencapaian target diantaranya:

Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) pada Bappeda Litbang bertanggung jawab mengampu tugas strategis yang meliputi perumusan kebijakan, koordinasi, serta pelaksanaan kegiatan kelitbang. Tugas ini mencakup aspek riset/penelitian, perekayasa, serta pengembangan ekosistem inovasi dan teknologi daerah.

Sebagai tolak ukur keberhasilan pengembangan ekosistem inovasi tersebut, digunakan parameter Indeks Inovasi Daerah. Perhitungan indeks ini menerapkan sistem poin yang mengacu pada formulasi definisi operasional dalam IKU 2021-2026. Adapun tren capaian datanya sejak tahun 2021 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.5
Indeks Inovasi Daerah Kota Balikpapan 2021-2025
 Sumber: SK Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025

Secara komprehensif, capaian terhadap target kinerja tahun 2025 menunjukkan tren positif yang signifikan. Keberhasilan pelampauan target Indeks

Inovasi Daerah (IID) dipengaruhi oleh beberapa faktor determinan strategis sebagai berikut:

1. Penguatan Ekosistem Regulasi dan Institusionalisasi

Optimalisasi skor IID sangat berkorelasi dengan kualitas legitimasi dokumen pendukung program. Langkah strategis yang diambil meliputi:

- a. Terkait Legitimasi Operasional, Pemerintah Kota menerbitkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Balikpapan bagi setiap inovasi yang telah terdaftar. Kebijakan ini tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga berkontribusi memberikan bobot poin maksimal pada parameter regulasi.
- b. Dalam aspek Penyelarasan Strategis, pemerintah daerah dalam hal ini BAPPEDA LITBANG telah menyusun *Roadmap* Inovasi Daerah yang terintegrasi secara koheren dengan RPJMD 2021-2026. Upaya ini memastikan bahwa setiap inovasi memiliki keberlanjutan (*sustainability*) jangka panjang dan tidak berhenti pada tahap uji coba saja.

2. Akselerasi Transformasi Digital Layanan Publik

Peningkatan nilai IID didorong secara masif melalui transisi model layanan dari konvensional (analog) menuju berbasis digital:

- a. Integrasi Sistem dan Interoperabilitas, penggabungan berbagai aplikasi sektoral ke dalam satu portal terpadu. Langkah ini terbukti meningkatkan skor pada indikator kemanfaatan, efisiensi waktu, dan transparansi layanan.
- b. Asistensi Teknis Berkala (*Desk Input*), pelaksanaan bimbingan teknis intensif bagi admin inovasi di setiap Perangkat Daerah untuk menjamin akurasi dan validitas data yang diunggah ke sistem inovasi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri RI.

3. Internalisasi Budaya Inovasi dan Kompetisi

Keberhasilan capaian tahun 2025 juga dipicu oleh terciptanya ekosistem kompetisi yang sehat di lingkungan pemerintah maupun masyarakat:

- a. Penyaringan Mutu melalui kompetisi Kreativitas dan Inovasi Daerah (KRENOVA), penyelenggaraan Lomba Inovasi Daerah berfungsi sebagai instrumen filtrasi untuk menjaring inovasi berkualitas tinggi sebelum

dipasok ke kompetisi tingkat nasional atau *Innovative Government Award* (IGA).

- b. Skema *Reward* dan Apresiasi, pemberian penghargaan bagi OPD dan ASN inovator sebagai stimulus untuk meningkatkan produktivitas dan kuantitas inovasi baru secara konsisten setiap tahunnya.

4. Monitoring, Evaluasi, dan Intervensi Kebijakan

Pemerintah Kota Balikpapan menerapkan pengawasan ketat terhadap fluktuasi capaian tahunan berdasarkan hasil revidi berkala dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri RI, apabila ditemukan indikator yang masih lemah pada tahun sebelumnya Bappeda Litbang melakukan intervensi kebijakan khusus guna melakukan perbaikan nilai variabel tersebut secara presisi pada siklus berikutnya.

Meskipun realisasi Indeks Inovasi Daerah (IID) telah berada pada kategori **“Inovatif”**, pencapaian tersebut belum memenuhi target proyeksi yang ditetapkan secara optimal. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa kendala fundamental yang memengaruhi akumulasi nilai akhir, antara lain:

1) Disparitas antara Implementasi Lapangan dan Standar Evidensi

Terdapat kesenjangan (*gap*) yang cukup signifikan antara kualitas implementasi inovasi di lapangan dengan pemenuhan dokumen pendukung. Banyak inovasi pada Perangkat Daerah memiliki dampak riil yang positif, namun tidak didukung oleh dokumentasi administrasi yang presisi, seperti regulasi teknis, dokumentasi visual yang representatif, maupun testimoni penerima manfaat sesuai dengan kriteria parameter penilaian BSKDN Kemendagri. Hal ini menyebabkan terjadinya reduksi nilai secara otomatis pada saat proses validasi di tingkat pusat.

2) Dinamika Pemutakhiran Parameter dan Definisi Operasional

Adanya fluktuasi dan pemutakhiran indikator dalam sistem IID yang dilakukan setiap tahun menuntut adaptabilitas yang tinggi. Perubahan definisi operasional yang semakin spesifik dan kompleks mengharuskan pemerintah daerah untuk terus melakukan penyesuaian data dukung secara berkelanjutan.

Inovasi yang pada tahun sebelumnya mendapatkan skor tinggi, kini memerlukan rincian data yang lebih mendalam untuk mempertahankan bobot nilai yang sama.

3) Keterbatasan Skalabilitas dan Replikasi Inovasi

Target kinerja disusun berdasarkan asumsi difusi inovasi secara masif di seluruh unit kerja. Namun pada praktiknya, keberadaan inovasi unggulan masih cenderung bersifat sektoral atau terlokalisasi pada satu Perangkat Daerah saja. Belum terciptanya mekanisme replikasi yang luas ke wilayah atau instansi lain menyebabkan poin pada variabel "Kemanfaatan" dan "Replikasi" belum dapat terdongkrak secara maksimal.

4) Maturitas Inovasi yang Masih dalam Fase Uji Coba

Sejumlah inovasi strategis yang baru diluncurkan masih berada dalam fase uji coba (*pilot project*). Sesuai ketentuan penilaian, inovasi yang belum menyelesaikan siklus uji coba secara tuntas belum dapat diberikan penilaian penuh pada indikator "Kemanfaatan dan Keberlanjutan". Mengingat indikator ini memiliki bobot poin yang sangat dominan dalam akumulasi indeks, maka dampak skor dari inovasi-inovasi baru tersebut baru akan terlihat secara signifikan pada periode penilaian berikutnya.

Guna mengoptimalkan capaian dan memitigasi risiko ketidaktercapaian target indikator, Bappeda Litbang Kota Balikpapan telah melaksanakan serangkaian langkah strategis sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan *Coaching Clinic* dan Asistensi Teknis Terintegrasi

Bappeda Litbang melaksanakan pendampingan intensif bagi setiap Perangkat Daerah (PD) melalui mekanisme *coaching clinic*. Fokus utama dari kegiatan ini adalah:

- a. Verifikasi dan Validasi Data Dukung, guna memastikan kesesuaian dokumen bukti (*evidence*) secara presisi terhadap 20 indikator Satuan Inovasi Daerah.
- b. Optimalisasi Nilai Kematangan, dengan melakukan reviu mendalam terhadap setiap variabel guna memastikan inovasi yang diinput

memenuhi standar maturitas maksimal sesuai dengan regulasi yang berlaku.

2. Sistem Monitoring dan Evaluasi Internal

Pemerintah Kota memperkuat fungsi pengawasan untuk menjamin keberlanjutan inovasi melalui:

- a. Penguatan Forum Koordinasi Evaluasi, dengan Mengintegrasikan evaluasi inovasi ke dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) sebagai agenda strategis. Hal ini memungkinkan pemantauan progres dilakukan secara berkala dan berjenjang.
- b. Penyelesaian Hambatan Proaktif (*Problem Solving*) melalui pemantauan frekuensi tinggi, setiap kendala teknis maupun administratif di lapangan dapat diidentifikasi lebih dini, sehingga langkah-langkah intervensi dan solusinya dapat segera dirumuskan secara kolektif.

Kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi yang difasilitasi berhasil mencapai target 100%. Pencapaian paripurna ini didukung oleh pelaksanaan empat langkah strategis utama sepanjang tahun 2025, yaitu:

1. Penyelenggaraan Kompetisi Kreativitas dan Inovasi Daerah (KRENOVA)

Kegiatan ini bertujuan untuk menstimulasi ekosistem inovasi yang inklusif di Kota Balikpapan. KRENOVA menjadi wadah apresiasi sekaligus kompetisi bagi para inovator dari berbagai klaster, meliputi:

- a. Perangkat Daerah, tujuannya adalah mendorong reformasi birokrasi melalui inovasi guna peningkatan kualitas pelayanan publik
- b. Masyarakat Umum & Akademisi, tujuannya untuk memfasilitasi ide-ide dari pelajar, mahasiswa, tenaga pendidik (guru/dosen), serta masyarakat umum agar dapat dikembangkan menjadi solusi nyata bagi permasalahan kota.



2. Asistensi Teknis Penginputan Indeks Inovasi Daerah (IID)

Bappeda Litbang melakukan pendampingan intensif (*coaching*) terhadap Perangkat Daerah dalam proses penginputan data inovasi. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan kepatuhan administrasi dan kualitas bukti inovasi pada aplikasi *Innovative Government Award* (IGA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, guna mempertahankan predikat kota yang inovatif.



3. Diseminasi Hasil Kelitbangan

Upaya ini dilakukan untuk memastikan hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan tidak berhenti sebagai dokumen semata, melainkan bertransformasi menjadi landasan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Adapun tema diseminasi pada tahun 2025 yaitu “Strategi dan Inovasi Penyusunan kelitbangan dalam rangka Efisiensi Tahun 2026”.



4. Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual (HKI)

Pemerintah Kota memberikan fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (seperti Paten, Hak Cipta, atau Merek) bagi inovasi-inovasi unggulan, hal ini menjadi satu rangkaian kegiatan KRENOVA yang diselenggarakan setiap tahunnya, harapannya dengan dilakukannya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual pada hasil inovasi, para inovator mendapatkan kepastian hukum (legalitas), melindungi orisinalitas karya, serta meningkatkan nilai ekonomi dan komersial dari inovasi yang dihasilkan masyarakat maupun pemerintah.



Pelaksanaan kegiatan riset/penelitian pada tahun 2025 menerapkan mekanisme Swakelola. Pendekatan ini dipilih untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya internal serta memastikan kendali mutu riset yang lebih intensif. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan telah mematuhi prinsip akuntabilitas dan berpedoman secara ketat pada landasan yuridis berikut:

1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola.
2. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Dokumen Swakelola.

Sebagai implementasi dari kegiatan tersebut, telah dihasilkan sejumlah kajian strategis yang berorientasi pada pengukuran indikator kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dan penyelesaian isu-isu permasalahan pembangunan di Kota Balikpapan, meliputi:

1. Kajian Survey Indeks Pelayanan Infrastruktur dan Kota Layak Huni Kota Balikpapan Tahun 2025

- a) Mekanisme Pelaksanaan

Kajian ini dilaksanakan melalui mekanisme Swakelola Tipe I, di mana Bappeda Litbang Kota Balikpapan bertindak sebagai penanggung jawab utama. Dalam pelaksanaannya, tim teknis didukung oleh asistensi dari 4 (empat) orang Tenaga Ahli yang berasal dari unsur akademisi lintas perguruan tinggi terkemuka, yaitu:

- 1) Politeknik Negeri Balikpapan (Poltekba);
- 2) Institut Teknologi Bandung (ITB); dan
- 3) Universitas Mulawarman (Unmul).

- b) Tujuan Strategis

Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja pembangunan daerah berbasis persepsi publik. Hasil kajian digunakan untuk mengukur efektivitas layanan infrastruktur dan tingkat kelayakan hunian, yang

selanjutnya menjadi basis data dalam penghitungan capaian indikator makro pembangunan Pemerintah Kota Balikpapan.

c) Metodologi dan Sampling

Pengukuran indeks dilakukan melalui pendekatan *mixed-method* dengan analisis data primer dan sekunder.

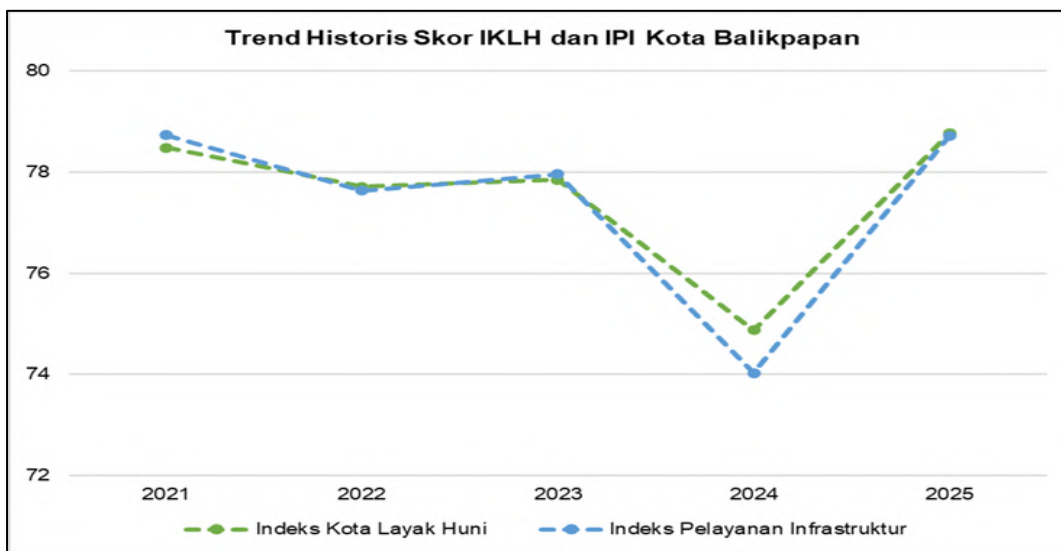
- 1) Pengumpulan Data: Survei lapangan dilakukan secara tatap muka (*face-to-face interview*) kepada 1.450 responden valid.
- 2) Kriteria Responden: Penduduk berusia minimal 17 tahun dengan tingkat pendidikan minimal SLTA/ sederajat.
- 3) Distribusi Sampel: Menggunakan teknik *Proportional Random Sampling* yang merepresentasikan seluruh wilayah kecamatan, termasuk menjangkau area *hinterland* (kawasan terluar/terpencil) untuk menjamin inklusivitas data.

d) Hasil Capaian Indeks (Skala 0-100)

Berdasarkan agregasi skor dari delapan aspek penilaian, capaian kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Indeks Pelayanan Infrastruktur : 78.71
- 2) Indeks Kota Layak Huni : 78.76
- 3) Indeks Gabungan : 78.81

Skor Indeks Pelayanan Infrastruktur, Indeks Kota Layak Huni, dan Indeks Gabungan pada tahun 2025 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2024 dan memiliki skor yang hampir sama dengan capaian pada tahun 2021.



Gambar 3.6
Grafik Skor IKLH dan IPI Kota Balikpapan Tahun 2021-2025
 Sumber: Laporan Kajian IKLH dan IPI Kota Balikpapan

Validitas capaian kinerja 100% dibuktikan dengan tersusunnya dokumen hasil kajian secara lengkap, yang terdiri atas:

- 1) Laporan Pendahuluan (3 buku): Memuat bab pendahuluan, gambaran umum wilayah, tinjauan pustaka, serta metodologi penelitian.
- 2) Laporan Akhir (3 buku): Memuat hasil pembahasan, analisis data, kesimpulan, serta rekomendasi strategis.
- 3) Ringkasan Eksekutif (*Executive Summary*) (3 buku): Memuat intisari komprehensif dari keseluruhan proses kajian, mulai dari tahap pendahuluan hingga hasil akhir.

Substansi dokumen mencakup rumusan strategi, hasil pengukuran, analisis arah kebijakan, dan rekomendasi perencanaan yang telah diselaraskan serta mendukung pencapaian target kinerja dalam RPJMD 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah. Seluruh dokumen laporan telah diserahterimakan dalam kondisi baik, lengkap, dan sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

2. Kajian Hidrogeologi Kota Balikpapan

- a) Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kajian Hidrogeologi ini dilaksanakan melalui mekanisme Swakelola Tipe II, bekerja sama dengan

Tim Peneliti dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Kerangka kerja sama ini dipilih untuk menjamin kualitas analisis teknis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

- b) Urgensi dan Latar Belakang Pelaksanaan kajian ini didasari oleh isu strategis kerentanan ketahanan air di Kota Balikpapan yang selama ini sangat bergantung pada air permukaan (tadah hujan/waduk). Berdasarkan data neraca air aktual:

1. Ketersediaan Air Kota: 524.147.443,99 m³/tahun.
2. Kebutuhan Air: 525.625.678,16 m³/tahun.
3. Ambang Batas Cadangan: 652.434,00 m³/tahun.

Kondisi ini menunjukkan adanya defisit neraca air sebesar -1.478.234,17 m³/tahun. Ketimpangan (gap) antara pasokan (*supply*) dan permintaan (*demand*) ini berpotensi mengancam keberlanjutan layanan air bersih bagi masyarakat jika tidak segera dicarikan alternatif sumber air baku baru.

- c) Tujuan dan Lingkup Kajian Kajian hidrogeologi ini bertujuan untuk memetakan potensi air tanah sebagai alternatif sumber air baku. Lingkup analisis mencakup:

1. Karakteristik fisik dan kimia batuan serta akuifer;
2. Pola pergerakan dan aliran air bawah tanah;
3. Analisis debit limpasan dan sifat curah hujan; serta
4. Estimasi potensi cadangan air tanah yang layak eksploitasi.

- d) Realisasi Output dan Bukti Dukung Capaian kinerja fisik kegiatan ini telah mencapai 100%. Validitas capaian tersebut dibuktikan dengan tersusunnya dokumen hasil kajian yang lengkap dan telah diverifikasi, meliputi:

1. Laporan Pendahuluan (3 buku): Memuat desain survei, gambaran umum wilayah, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian.
2. Laporan Akhir (3 buku): Memuat hasil interpretasi data, analisis model hidrogeologi, kesimpulan, serta rekomendasi teknis dan kebijakan.

3. Ringkasan Eksekutif (*Executive Summary*) (3 buku): Memuat intisari kajian dari tahap awal hingga rekomendasi akhir untuk pengambilan keputusan.

Seluruh dokumen laporan telah diperiksa dan diserahterimakan dalam kondisi baik, lengkap, serta memenuhi spesifikasi teknis yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

3. Kajian Reviu Kawasan Peruntukkan Industri Kariangau
 - a) Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan ini dilaksanakan melalui mekanisme Swakelola Tipe I, di mana Bappeda Litbang Kota Balikpapan bertindak sebagai penanggung jawab utama pelaksana kegiatan. Untuk menjamin kualitas substansi akademis, tim pelaksana didukung oleh asistensi teknis dari 5 (lima) orang Tenaga Ahli yang berasal dari unsur akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) dan Politeknik Negeri Balikpapan (Poltekba).
 - b) Latar Belakang dan Urgensi Penyusunan kajian ini merupakan langkah responsif dan strategis Pemerintah Kota Balikpapan dalam mereviu rencana induk (*masterplan*) KPI Kariangau. Reviu ini sangat mendesak dilakukan menyusul penetapan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebagai beranda utama dan penyangga IKN, KPI Kariangau memerlukan penyesuaian strategi pengembangan agar selaras dengan dinamika pembangunan wilayah nasional yang baru.
 - c) Tujuan dan Lingkup Kajian Secara spesifik, kajian ini bertujuan untuk:
 - 1) Memetakan potensi dan tantangan pengembangan KPI Kariangau dalam konstelasi wilayah IKN.
 - 2) Melakukan pemetaan ketersediaan, penguasaan, dan status kepemilikan lahan (*land tenure*) di kawasan industri.
 - 3) Menyusun desain pengembangan kawasan yang selaras dengan Rencana Tata Ruang (RTRW), fungsi ekonomi, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.
 - 4) Merumuskan model koordinasi dan kelembagaan pengelolaan kawasan yang efektif.

- 5) Menyusun peta jalan (*roadmap*) jangka pendek hingga menengah untuk mengakselerasi pertumbuhan kawasan yang terintegrasi dengan wilayah penyangga lainnya.
- d) Metodologi Partisipatif Untuk memperkuat validitas analisis, kajian ini menerapkan pendekatan partisipatif melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*multi-stakeholders*), mulai dari masyarakat di sekitar KPI Kariangau, Perangkat Daerah Pemerintah Kota Balikpapan, hingga instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- e) Realisasi Output dan Bukti Dukung Capaian kinerja fisik kegiatan ini telah terealisasi 100%. Hal ini dibuktikan dengan tersusunnya dokumen laporan secara lengkap, yaitu:
1. Laporan Pendahuluan (3 buku): Memuat latar belakang, gambaran umum wilayah, tinjauan pustaka, dan desain metodologi.
 2. Laporan Akhir (3 buku): Memuat hasil analisis mendalam, kesimpulan, serta rekomendasi kebijakan strategis.
 3. Ringkasan Eksekutif (*Executive Summary*) (3 buku): Memuat intisari kajian untuk acuan pengambilan keputusan pimpinan.

Seluruh dokumen laporan telah diverifikasi, diterima dalam kondisi baik, serta dinyatakan lengkap sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

4. Kajian Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) Kota Balikpapan Tahun 2025

a) Mekanisme Pelaksanaan

Kegiatan penyusunan kajian ini dilaksanakan melalui mekanisme Swakelola Tipe I. Dalam pelaksanaannya, Bappeda Litbang Kota Balikpapan bertindak sebagai penanggung jawab utama dengan dukungan asistensi teknis dari Tim Tenaga Ahli Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda. Kolaborasi ini bertujuan untuk menjaga objektivitas dan kualitas akademis dalam penilaian kualitas perencanaan daerah.

b) Transformasi Metodologi Pengukuran

Terdapat perubahan fundamental dalam metode pengukuran IKP yang perlu dicatat sebagai konteks analisis:

1. Periode 2022–2023: Pengukuran menggunakan metode mandiri dengan pendekatan kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Penilaian didasarkan pada akumulasi tiga dimensi, yaitu: (1) Proses; (2) Substansi/Isi; dan (3) Jaminan Tindak Lanjut.
2. Periode 2024–Sekarang: Pengukuran telah diselaraskan dengan standar nasional mengacu pada Surat Edaran Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN).

Sesuai regulasi terbaru, komponen penilaian difokuskan pada tiga pilar strategis:

- 1) Sinergi dokumen perencanaan;
- 2) Kualitas dokumen perencanaan; serta
- 3) Keterhubungan antara perencanaan pembangunan dan kinerja.

c) Siklus dan Tahapan Pengukuran

Proses pengukuran IKP Kota Balikpapan dilaksanakan secara sistematis mengikuti tahapan standar IPPN sebagai berikut:

1. Pengumpulan Dokumen (*Submission*): Perangkat Daerah (PD) menyerahkan dokumen basis penilaian, meliputi RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah. Ketersediaan dan ketepatan waktu penyampaian dokumen menjadi variabel krusial dalam penilaian.
2. Verifikasi Administratif: Tim penilai melakukan pengecekan kelengkapan dokumen. Apabila ditemukan kekurangan, Perangkat Daerah diwajibkan melengkapi data dukung dalam batas waktu yang ditentukan.
3. Penilaian Substansi: Evaluasi mendalam terhadap dokumen perencanaan menggunakan Kertas Kerja (KK) dan instrumen penilaian terstandar yang telah disiapkan.

4. Pleno Hasil Penilaian: Penyampaian hasil evaluasi sementara oleh tim penilai kepada Bappeda dan pemangku kepentingan terkait untuk mendapatkan tanggapan/konfirmasi.
5. Diseminasi dan Rekomendasi: Penyampaian hasil akhir beserta rekomendasi perbaikan kepada Perangkat Daerah guna meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pada siklus berikutnya.

d) Analisis Tren Capaian IKP (2022–2025)

Meskipun terdapat perbedaan metodologi antara periode 2022–2023 dan 2024–2025, tren kualitas perencanaan di Kota Balikpapan secara umum menunjukkan peningkatan kinerja yang positif. Berikut adalah rekapitulasi capaian nilai IKP selama empat tahun penilaian:

1. Tahun 2022 dengan nilai 7,225 berpredikat cukup
2. Tahun 2023 dengan nilai 7,437 berpredikat cukup
3. Tahun 2024 dengan nilai 85,4 berpredikat baik, dan
4. Tahun 2025 dengan nilai 89 berpredikat baik

Catatan: Lonjakan nilai angka dari tahun 2023 ke 2024 disebabkan oleh perubahan instrumen dan skala penilaian (konversi ke skala 100 sesuai pedoman IPPN).

e) Output dan Bukti Dukung

Capaian kinerja fisik kegiatan ini telah terealisasi 100%. Validitas capaian tersebut dibuktikan dengan tersusunnya dokumen secara lengkap, yaitu:

1. Laporan Pendahuluan (3 buku): Memuat pendahuluan, gambaran umum wilayah, tinjauan pustaka, dan desain metodologi.
2. Laporan Akhir (3 buku): Memuat hasil analisis IKP, kesimpulan, serta matriks rekomendasi perbaikan perencanaan.
3. Ringkasan Eksekutif (*Executive Summary*) (3 buku): Memuat intisari hasil kajian untuk acuan pengambilan keputusan pimpinan.

Seluruh dokumen laporan telah diverifikasi, diterima dalam kondisi baik, lengkap, serta sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

5. Kajian Strategis Pemekaran Kelurahan pada Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025

- a) Dasar dan Mekanisme Pelaksanaan Pelaksanaan kajian ini didasari oleh surat usulan dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Nomor 125/00088/Pem tertanggal 19 Februari 2024 perihal Usulan Kajian Pemekaran Wilayah Kelurahan/Kecamatan.

Secara teknis, kegiatan ini dilaksanakan melalui mekanisme Swakelola Tipe II bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerja Sama (PPKK), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Pelibatan institusi pendidikan tinggi bertujuan untuk menjamin independensi, objektivitas, dan validitas akademis hasil kajian.

- b) Urgensi Strategis Pemekaran wilayah kelurahan merupakan langkah strategis untuk mendekatkan jangkauan pemerintahan kepada masyarakat, mendukung pemerataan pembangunan, serta meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Urgensi ini didorong oleh beberapa faktor determinan:
1. Dinamika Demografi & Ekonomi: Pertumbuhan penduduk yang pesat dan eskalasi aktivitas ekonomi di Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan Barat, dan Balikpapan Timur menuntut pelayanan administratif yang lebih responsif.
 2. Implikasi IKN: Perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan Timur memperkuat kebutuhan penataan wilayah. Sebagai kota penyangga (*hinterland*) utama, Balikpapan menghadapi peningkatan arus migrasi dan beban infrastruktur yang signifikan.
- c) Kerangka Regulasi dan Parameter Penilaian Kajian ini mengacu pada semangat otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*menggantikan UU No. 32 Tahun 2004*), yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan penataan wilayah demi kesejahteraan masyarakat.

Secara spesifik, analisis kelayakan pemekaran berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yang mensyaratkan pemenuhan tiga aspek utama:

1. Persyaratan Dasar: Meliputi jumlah penduduk/Kepala Keluarga (KK), luas wilayah, dan usia minimal penyelenggaraan kelurahan
2. Persyaratan Teknis: Meliputi kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sarana prasarana pemerintahan, dan aspek teknis kewilayahan lainnya.
3. Persyaratan Administratif: Meliputi adanya kesepakatan/keputusan melalui musyawarah forum komunikasi kelurahan

d) Hasil Analisis Kelayakan Berdasarkan hasil verifikasi terhadap persyaratan dasar, teknis, dan administratif, kelurahan yang dinyatakan layak dimekarkan adalah:

- 1) Kecamatan Balikpapan Utara: Kelurahan Graha Indah dan Kelurahan Karang Joang
- 2) Kecamatan Balikpapan Timur: Kelurahan Manggar
- 3) Kecamatan Balikpapan Barat: Kelurahan Kariangau

e) Rekomendasi Strategis Tim kajian ini merumuskan rekomendasi komprehensif sebagai berikut:

- 1) Aspek Kelembagaan dan Pelayanan Publik Prioritas pada pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemekaran, penetapan toponimi (nama) dan batas wilayah, serta pengisian formasi SDM Aparatur. Hal ini harus diikuti dengan pemenuhan sarana kantor, akses pelayanan dasar, penataan administrasi kependudukan, serta alokasi anggaran yang bertahap dan berkesinambungan di bawah supervisi Perangkat Daerah terkait
- 2) Aspek Tata Ruang Pemekaran harus selaras dengan RTRW Kota Balikpapan Tahun 2024-2043, disertai penguatan basis data spasial kependudukan dan penegasan batas wilayah definitif
- 3) Aspek Fiskal Kebijakan pemekaran diarahkan untuk pemerataan beban fiskal daerah. Fokus utamanya adalah penguatan kapasitas

kelembagaan melalui digitalisasi layanan guna efisiensi anggaran pasca penetapan

- 4) Catatan Khusus: Kelurahan Kariangau Meskipun secara analisis teknis Kelurahan Kariangau (yang didominasi kawasan industri) dinyatakan layak mekar, tim merekomendasikan penundaan eksekusi pemekaran. *Alasan:* Persoalan mendasar di Kariangau saat ini adalah aksesibilitas dan jarak tempuh yang jauh menuju pusat pelayanan kecamatan. Oleh karena itu, prioritas rekomendasi adalah penataan wilayah kecamatan terlebih dahulu sebelum melakukan pemekaran kelurahan.
- f) Output dan Bukti Dukung Realisasi capaian kinerja kegiatan ini adalah 100%, yang dibuktikan dengan tersusunnya dokumen secara lengkap sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK), yaitu:
 - 1) Laporan Pendahuluan (3 buku): Memuat metodologi, gambaran umum, dan tinjauan pustaka
 - 2) Laporan Akhir (3 buku): Memuat hasil analisis data, kesimpulan kelayakan, dan rekomendasi kebijakan
 - 3) Ringkasan Eksekutif (*Executive Summary*) (3 buku): Dokumen ringkas untuk acuan pengambilan keputusan pimpinan
 - 4) Album Peta Indikatif (3 buku): Menyajikan informasi geospasial eksisting dan rencana pemekaran, mencakup batas wilayah, infrastruktur, guna lahan, dan potensi sumber daya
 - 5) Naskah Akademik (3 buku): Dokumen ilmiah yang berfungsi sebagai dasar yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemekaran wilayah
6. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan & Teknologi Daerah (RIPJPID) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029
 - a) Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan ini dilaksanakan melalui mekanisme Swakelola Tipe II, bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerja Sama (PPKK), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Kemitraan strategis dengan

perguruan tinggi ini bertujuan untuk menjamin kualitas metodologi riset dan objektivitas dalam perumusan kebijakan Iptek daerah.

- b) Landasan Regulasi dan Kelembagaan Penyusunan dokumen ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 (Pasal 66 Ayat 2) dan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nomor 5 Tahun 2023. Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan.

Dalam konteks ini, Bappeda Litbang Kota Balikpapan selaku pengampu fungsi kelitbangan, menyusun RIPJPID sebagai panduan strategis implementasi riset dan inovasi daerah guna mendukung pencapaian target pembangunan kota.

- c) Momentum Penyelarasan Perencanaan Penyusunan RIPJPID Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan 2025-2029. Kesenjangan ini menjadi momentum krusial untuk melakukan penyelarasan (*alignment*) dan integrasi substansi, sehingga peta jalan iptek dan inovasi benar-benar koheren dengan visi-misi pembangunan jangka menengah daerah.
- d) Substansi dan Arah Kebijakan Riset Berdasarkan hasil analisis data, wawancara mendalam, dan *Focus Group Discussion* (FGD), dokumen ini merumuskan arah pembangunan ekonomi berbasis inovasi dengan fokus sebagai berikut:

- 1) Penguatan sektor Industri Pengolahan, khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM), untuk membangun ekosistem industri yang berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi.
- 2) Peningkatan daya saing sektor Jasa dan Perdagangan melalui intervensi inovasi teknologi dan digitalisasi layanan.
- 3) Optimalisasi posisi strategis Balikpapan sebagai beranda Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui pengembangan sektor Pariwisata, Ekonomi

Kreatif, dan Jasa MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

e) Realisasi Output dan Bukti Dukung Capaian kinerja fisik kegiatan ini telah terealisasi 100%. Validitas capaian dibuktikan dengan tersusunnya dokumen kajian secara lengkap, yaitu:

1. Laporan Pendahuluan (2 buku): Memuat kerangka konseptual, tinjauan pustaka, gambaran umum wilayah, dan metodologi penyusunan.
2. Laporan Akhir (3 buku): Memuat hasil analisis, peta jalan (*roadmap*), matriks program, kesimpulan, dan rekomendasi kebijakan.
3. Ringkasan Eksekutif (*Executive Summary*) (3 buku): Dokumen ringkas yang memuat intisari kebijakan strategis untuk acuan pengambilan keputusan pimpinan.

Seluruh dokumen laporan telah diverifikasi, diterima dalam kondisi baik, lengkap, serta sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Sasaran Strategis III

Sasaran strategis ketiga adalah meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja berupa Nilai AKIP Bappeda Litbang. Pada Tahun 2025, pengukuran sasaran tersebut mengacu pada Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 dengan capaian sebesar 100.93%.

Selanjutnya pada Renstra Bappeda Litbang Tahun 2025–2029, sasaran strategis yang ketiga adalah meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diukur melalui indikator kinerja, yaitu nilai AKIP perangkat daerah dengan capaian sebesar 100.93%. Nilai tersebut adalah capaian pada tahun 2025 yang merupakan tahun awal periode Renstra tahun 2025-2029. Pencapaian tersebut didukung melalui program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan kegiatan yang berdampak pada pencapaian target diantaranya:

1. Administrasi umum perangkat daerah dengan uraian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD di Bappeda Litbang dilaksanakan untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antar perangkat daerah guna mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan.
 - b. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dilaksanakan untuk mendukung kelancaran operasional perkantoran melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana penerangan yang memadai, aman, dan sesuai standar, sehingga menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
 - c. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor di Bappeda Litbang dilaksanakan untuk mendukung kelancaran operasional kantor dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan perencanaan, penelitian, dan pengembangan pembangunan daerah melalui penyediaan sarana kerja yang memadai.
 - d. Penyediaan bahan logistik kantor dilaksanakan untuk mendukung kelancaran operasional kantor dan efektivitas pelaksanaan tugas melalui penyediaan bahan habis pakai yang memadai.
 - e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dilaksanakan untuk mendukung kelancaran operasional kantor serta efektivitas pelaksanaan tugas melalui penyediaan dokumen, materi cetak, dan penggandaan yang diperlukan.
 - f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan surat kabar/media cetak yang bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur terhadap kebijakan yang berlaku serta informasi terkini.
 - g. Fasilitasi kunjungan tamu dilaksanakan untuk mendukung kelancaran penerimaan dan pelayanan kunjungan tamu guna menunjang koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait.
 - h. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan arsip yang sistematis,

aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini bertujuan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi melalui penyediaan arsip dinamis yang tertata, mudah diakses, dan akuntabel.

2. Administrasi keuangan perangkat daerah dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dilaksanakan untuk menjamin pemenuhan hak kepegawaian aparatur sipil negara secara tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini bertujuan mendukung kesejahteraan ASN serta menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara tepat dan konsisten. Kegiatan ini bertujuan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi agar berjalan sesuai regulasi serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Pada tahun 2025 Bappeda Litbang melaksanakan bimtek yaitu:

- a. Bimbingan Teknis Penyelarasan Renstra Perangkat Daerah dengan Sasaran Kerja Pegawai

- b. Bimbingan Teknis Pengembangan Kompetensi ASN terkait Metode Penyusunan Proses Bisnis, Standar Pelayanan dan SOP serta Metode Penulisan Policy Brief



- c. Bimbingan Teknis Pedoman Penataan Arsip Dinamis



4. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dilaksanakan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat sesuai kebutuhan organisasi. Kegiatan ini bertujuan

menyediakan sarana transportasi dinas yang layak, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan efektivitas kinerja. Pada tahun 2025 pengadaan kendaraan dinas jabatan berupa sewa 5 unit mobil untuk pejabat eselon III yang ada di Bappeda Litbang Kota Balikpapan.

5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan uraian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat dilaksanakan dalam rangka mendukung kelancaran administrasi dan komunikasi kedinasan. Kegiatan ini bertujuan memastikan proses pengiriman, penerimaan, dan pengelolaan surat berjalan tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas organisasi.
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan layanan penunjang operasional perkantoran secara berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi melalui penyediaan fasilitas komunikasi, air, dan listrik yang memadai serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dilaksanakan untuk mendukung kelancaran operasional organisasi dengan menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas serta mendukung produktivitas aparatur dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya.
 - d. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dilaksanakan untuk mendukung kelancaran operasional kantor melalui penyediaan layanan penunjang yang memadai, tertib, dan efisien. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kenyamanan, produktivitas, serta efektivitas aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.
6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan uraian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dilaksanakan untuk

menjamin ketersediaan kendaraan dinas yang layak, aman, dan operasional secara optimal. Kegiatan ini bertujuan mendukung kelancaran tugas dan fungsi organisasi melalui pemeliharaan rutin, pembayaran pajak tepat waktu, serta efisiensi penggunaan sarana transportasi dinas. Pada tahun 2025 Bappeda Litbang melakukan pemeliharaan 6 unit kendaraan dinas jabatan.

- b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dilaksanakan untuk memastikan kendaraan dinas operasional dan lapangan selalu dalam kondisi layak pakai, aman, dan siap mendukung pelaksanaan tugas. Kegiatan ini bertujuan mendukung kelancaran operasional organisasi melalui pemeliharaan rutin, pembayaran pajak, serta pengurusan perizinan kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2025 Bappeda Litbang melakukan pemeliharaan 16 unit kendaraan dinas operasional.
- c. Pemeliharaan mebel dilaksanakan untuk menjaga kondisi dan fungsi mebel di lingkungan kantor agar tetap layak pakai, aman, dan nyaman. Kegiatan ini bertujuan mendukung kelancaran operasional organisasi serta meningkatkan efisiensi dan kenyamanan aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- d. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dilaksanakan untuk memastikan semua peralatan dan mesin pendukung operasional kantor berfungsi dengan baik, aman, dan andal (mesin fotocopy, mesin absensi, CCTV, sound system, TV wall, microphone, AC, komputer/notebook, printer). Kegiatan ini bertujuan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas organisasi serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sarana kerja.
- e. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dilaksanakan untuk menjaga kondisi gedung dan bangunan agar tetap layak, aman, dan nyaman digunakan. Kegiatan ini bertujuan mendukung kelancaran operasional organisasi serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

3.2.7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya, khususnya anggaran dan sumber daya pendukung lainnya, terhadap *output* dan *outcome* yang dihasilkan. Uraian difokuskan untuk menunjukkan tingkat efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan serta optimalisasi penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian kinerja. Adapun analisis atas penggunaan sumber daya tersebut sebagai berikut:

1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga efisiensi pemanfaatan SDM menjadi faktor penting dalam pencapaian kinerja perangkat daerah. Pada subbab ini disajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025 dengan mengkaji kesesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan aparatur, pola penugasan, serta kontribusinya terhadap pencapaian kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK), diketahui bahwa kebutuhan aparatur sipil negara pada Bappeda Litbang Kota Balikpapan berjumlah 151 orang. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Tahun 2025, perangkat daerah hanya didukung oleh 39 orang ASN/PNS. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM, yang menjadi dasar dalam analisis efisiensi pemanfaatan SDM.

Untuk memberikan gambaran komposisi SDM yang tersedia, berikut disajikan data jumlah ASN/PNS menurut jabatan dan jenis kelamin.

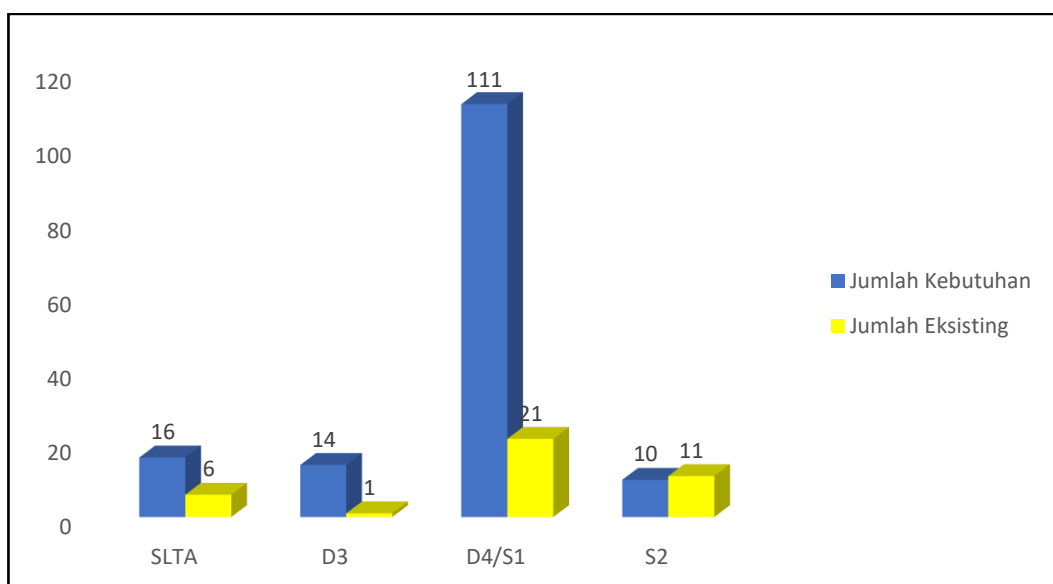
Tabel 3.13
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappeda Litbang Kota Balikpapan
Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

No.	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki - laki (L)	Perempuan (P)
1	2	3	4
1	Kepala Badan		1
2	Sekretaris	1	
3	Kepala Bidang Insfrastruktur Kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1	
4	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1	
5	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1	
6	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	1	
7	Kepala Subbagian Umum	1	
8	Kepala Subbagian Keuangan		1
9	Perencana Ahli Muda	2	5
10	Perencana Ahli Pertama		2
11	Fasilitator Pemerintahan		1
12	Analisis Pemanfaatan Iptek		1
13	Peneliti Ahli Muda	1	1
14	Peneliti Ahli Pertama		1
15	Statistisi Ahli Pertama	1	1
16	Analisis Data Ilmiah Muda	1	
17	Penelaah Teknis Kebijakan		4

No.	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki - laki (L)	Perempuan (P)
1	2	3	4
18	Pengadministrasi Perkantoran	3	2
19	Penata Layanan Operasional		1
20	Operator Layanan Operasional	1	
21	Non ASN	1	2
Jumlah		16	23

Sumber: Data kepegawaian Bappeda Litbang

Selain ditinjau dari jabatan, kondisi sumber daya manusia juga dianalisis berdasarkan tingkat kualifikasi pendidikan untuk melihat kesesuaian kompetensi aparatur dengan kebutuhan organisasi (dapat dibuat diagram/ tabel masing-masing menurut tingkat pendidikan).



Gambar 3.7
Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappeda Litbang
Kota Balikpapan menurut tingkat Pendidikan
 Sumber: Data Kepegawaian Bappeda Litbang

Berdasarkan gambaran tersebut, dapat dijelaskan bahwa kondisi sumber daya manusia pada Bappeda Litbang Kota Balikpapan didominasi oleh aparatur dengan kualifikasi pendidikan D4/S1 sebanyak 21 orang, diikuti oleh aparatur dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 11 orang. Komposisi SDM tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada Bappeda Litbang Kota Balikpapan tahun 2025 dilaksanakan melalui pemanfaatan SDM yang tersedia dengan pola penugasan berdasarkan hasil dialog kinerja yang dituangkan dalam matrik peran hasil (MPH) sebagai dasar penentuan sasaran kinerja setiap pegawai, sehingga seluruh program dan kegiatan dapat berjalan secara optimal tanpa penambahan jumlah SDM. Pemanfaatan SDM tersebut mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah secara keseluruhan, dengan tetap memperhatikan optimalisasi beban kerja dan kesesuaian kompetensi aparatur.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana

Untuk mendukung analisis atas efisiensi penggunaan sarana dan prasarana, disajikan data inventarisasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan data tersebut menggambarkan jenis, jumlah, kondisi, serta tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah pada tahun pelaporan. Penyajian data ini dimaksudkan sebagai dasar dalam menilai kesesuaian antara ketersediaan sarana dan prasarana dengan kebutuhan organisasi.

Tabel 3.14
Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana Bappeda Litbang

No	Jenis Sarana/ Prasarana	Jumlah Unit	Kondisi	Digunakan	Tidak Digunakan	Keterangan
1	Gedung/Bangunan	1	Baik	✓		Digunakan untuk pelayanan operasional
2	Kendaraan Dinas	15	Baik	✓		Digunakan untuk kegiatan lapangan
3	Peralatan Kantor	613	Baik	✓		Mendukung administrasi
4	Sarana Pendukung Lainnya	36	Rusak Ringan		✓	Dalam proses perbaikan
	Jumlah	665				

Sumber: KIB Bappeda Litbang Kota Balikpapan

Berdasarkan tabel inventarisasi sarana dan prasarana, diketahui bahwa sebagian besar aset yang dimiliki oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan berada dalam kondisi baik dan digunakan secara aktif untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Sarana dan prasarana tersebut dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, baik untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran maupun pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sarana dan prasarana telah dilakukan secara optimal dan mendukung efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Adapun tabel mengenai jumlah aset yang digunakan dan tidak digunakan memberikan gambaran nilai aset yang telah dimanfaatkan secara aktif serta aset yang belum digunakan secara optimal. Aset yang belum digunakan umumnya disebabkan oleh faktor kondisi fisik, keterbatasan kebutuhan operasional, atau penyesuaian terhadap kebijakan dan prioritas organisasi. Informasi ini menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana, khususnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pada periode selanjutnya.

3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pengukuran efisiensi anggaran diadaptasi dari pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

CKi : Capaian keluaran i (kolom 6)

PAKi : Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

Adapun pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dalam penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.15
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja	Nilai	Perjanjian Kinerja (PK) perubahan Bappeda Litbang Tahun 2025	43.87	43.36	98.84%	Rp 3,865,088,215	Rp 3,165,412,155	81.90%	17.14%	-
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui penelitian, pengembangan dan inovasi	Indeks inovasi daerah	Indeks	Perjanjian Kinerja (PK) perubahan Bappeda Litbang Tahun 2025	58.01	60.92	105.02%	Rp3,732,919,278	Rp3,478,228,559	93.18%	11.27%	Efisien
3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP Bappeda Litbang	Nilai	Perjanjian Kinerja (PK) perubahan Bappeda Litbang Tahun 2025	76.49	77.20	100.93%	Rp 14,724,302,050	Rp 12,839,215,551	87.20%	13.60%	Efisien
Keterangan:												
1.	Indikator kinerja pada tabel ini bersumber dari Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, yang memuat indikator dari Renstra Bappeda Litbang Tahun 2021–2026 dan Renstra Bappeda Litbang Tahun 2025–2029 sebagai bagian dari masa transisi perencanaan;											
2.	Efisiensi penggunaan anggaran hanya diakui untuk indikator kinerja dengan capaian $\geq 100\%$, meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh;											
3.	Perbedaan sasaran dan indikator kinerja merupakan konsekuensi dari penyesuaian terhadap dokumen perencanaan periode baru dan tidak dilakukan penyamaan indikator yang berbeda.											

Sumber: Data diolah Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025

Tabel 3.16
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025/ Renstra
Bappeda Litbang Tahun 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, berkelanjutan dan inovatif	Indeks perencanaan pembangunan daerah	Indeks	Perjanjian Kinerja (PK) perubahan Bappeda Litbang Tahun 2025 atas Renstra 2025-2029	84.80	89.00	104.95%	Rp 22,322,309,543	Rp 19,482,856,265	87.28%	16.84%	Efisien
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi kinerja	Nilai AKIP Kota Balikpapan komponen perencanaan kinerja	Nilai	Perjanjian Kinerja (PK) perubahan Bappeda Litbang Tahun 2025 atas Renstra 2025-2029	22.77	22.80	100.13%	-	-	-	-	Efisien
		Nilai AKIP Kota Balikpapan komponen pengukuran kinerja	Nilai	Perjanjian Kinerja (PK) perubahan Bappeda Litbang Tahun 2025 atas Renstra 2025-2029	20.58	20.56	99.90%	Rp 3,865,088,215	Rp 3,165,412,155	81.90%	18.02%	-

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks inovasi daerah	Indeks	Perjanjian Kinerja (PK) perubahan Bappeda Litbang Tahun 2025 atas Renstra 2025-2029	58.01	60.92	105.02%	Rp 3,732,919,278	Rp 3,478,228,559	93.18%	11.27%	Efisien
4	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Perjanjian Kinerja (PK) perubahan Bappeda Litbang Tahun 2025 atas Renstra 2025-2029	76.49	77.20	100.93%	Rp 14,724,302,050	Rp 12,839,215,551	87.20%	13.60%	Efisien
Keterangan:												
1.	Indikator kinerja pada tabel ini bersumber dari Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, yang memuat indikator dari Renstra Bappeda Litbang Tahun 2021–2026 dan Renstra Bappeda Litbang Tahun 2025–2029 sebagai bagian dari masa transisi perencanaan;											
2.	Efisiensi penggunaan anggaran hanya diakui untuk indikator kinerja dengan capaian $\geq 100\%$, meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh;											
3.	Perbedaan sasaran dan indikator kinerja merupakan konsekuensi dari penyesuaian terhadap dokumen perencanaan periode baru dan tidak dilakukan penyamaan indikator yang berbeda.											

Sumber: Data diolah Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran), diketahui bahwa penggunaan anggaran Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun berdasarkan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang bersumber dari Renstra Tahun 2021–2026 dan Renstra Tahun 2025–2029 sebagai bagian dari masa transisi perencanaan.

Dari hasil analisis tersebut, diketahui bahwa terdapat dua indikator yang bersumber dari Renstra Tahun 2021–2026 yang capaian kinerjanya mencapai 100% atau lebih, sehingga efisiensi penggunaan anggaran dapat diakui. Efisiensi tersebut terjadi meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh, namun seluruh kegiatan pendukung indikator telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Sementara itu, untuk indikator kinerja berdasarkan Renstra Tahun 2025–2029 diketahui terdapat empat indikator yang capaian kinerjanya juga mencapai 100% atau lebih, sehingga efisiensi penggunaan anggaran juga dapat diakui. Efisiensi penggunaan anggaran pada indikator tersebut antara lain dipengaruhi oleh:

1. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi lintas perangkat daerah yang sebagian besar dilaksanakan melalui forum daring dan rapat internal, sehingga mengurangi kebutuhan belanja perjalanan dinas dan konsumsi rapat;
2. Pelaksanaan fasilitasi kebijakan daerah yang memanfaatkan sumber daya internal Bappeda Litbang Kota Balikpapan tanpa memerlukan dukungan pihak ketiga secara signifikan;
3. Efisiensi belanja operasional perkantoran akibat penyesuaian pola kerja dan pemanfaatan sarana prasarana yang telah tersedia.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan telah mencukupi dan dimanfaatkan secara efisien untuk mendukung pencapaian kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan.

Di sisi lain, terdapat satu indikator kinerja yang bersumber dari Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 yang capaian kinerjanya belum mencapai 100%, sehingga efisiensi penggunaan anggaran tidak dapat diakui. Pada indikator-indikator tersebut, meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh, pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mendukung pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Ketidakefisienan tersebut antara lain disebabkan oleh:

1. Keterbatasan kewenangan Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam memengaruhi capaian indikator yang bersifat lintas perangkat daerah;
2. Belum optimalnya tindak lanjut hasil koordinasi dan fasilitasi kebijakan oleh perangkat daerah teknis; dan
3. Adanya penyesuaian kebijakan dan prioritas pada tahun berjalan yang memengaruhi realisasi target kinerja.

Selain itu, hal yang sama juga terjadi pada satu indikator kinerja yang mengacu dari Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 yang juga tidak diakui efisiensi penggunaan anggarannya karena capaian kinerjanya belum mencapai 100%. Hal ini wajar mengingat indikator tersebut merupakan indikator periode perencanaan baru yang baru mulai diimplementasikan pada tahun pertama Renstra. Kondisi ini dipengaruhi oleh:

1. Proses penyesuaian kebijakan, sasaran, dan indikator kinerja terhadap arah pembangunan periode baru;
2. Masih berlangsungnya proses penyelarasan perencanaan dan penganggaran lintas perangkat daerah; dan
3. Keterbatasan waktu implementasi indikator pada tahun pertama Renstra.

Secara keseluruhan, analisis efisiensi penggunaan anggaran Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025 menunjukkan bahwa efisiensi dapat diakui pada indikator-indikator kinerja tertentu yang telah mencapai target, sementara pada indikator lainnya efisiensi belum dapat diakui karena capaian kinerja yang belum optimal. Hasil analisis ini menjadi dasar evaluasi dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran pada periode perencanaan berikutnya.

3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun 2025, realisasi anggaran belanja Bappeda Litbang Kota Balikpapan mencapai sebesar 87.28% dari total anggaran yang dialokasikan. Informasi mengenai anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.17
Realisasi Anggaran Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025

Uraian	Anggaran		
	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 3,865,088,215	Rp 3,165,412,155	81.90%
Kegiatan Penyusunan perencanaan dan pendanaan	Rp 2,057,631,540	Rp 1,554,757,022	75.56%
Sub Kegiatan Pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota	Rp 2,057,631,540	Rp 1,554,757,022	75.56%
Kegiatan Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Rp 1,179,729,950	Rp 1,136,548,559	96.34%
Sub Kegiatan Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Rp 918,906,000	Rp 882,418,924	96.03%
Sub Kegiatan Penyusunan profil pembangunan daerah kabupaten/kota	Rp 260,823,950	Rp 254,129,635	97.43%
Kegiatan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Rp 627,726,725	Rp 474,106,574	75.53%
Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala dan pelaksanaan pembangunan daerah	Rp 627,726,725	Rp 474,106,574	75.53%
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp 3,732,919,278	Rp 3,478,228,559	93.18%
Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian	Rp 1,082,174,192	Rp 1,078,535,770	99.66%
Sub Kegiatan Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi	Rp 1,067,174,192	Rp 1,063,629,270	99.67%
Sub Kegiatan Pengelolaan data kelitbang dan peraturan	Rp 15,000,000	Rp 14,906,500	99.38%
Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Rp 118,562,200	Rp 90,332,078	76.19%
Sub Kegiatan Penelitian dan pengembangan partisipasi masyarakat	Rp 118,562,200	Rp 90,332,078	76.19%

Uraian	Anggaran		
	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4
Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Rp 1,375,000,000	Rp 1,268,814,910	92.28%
Sub Kegiatan Penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan	Rp 475,000,000	Rp 409,488,475	86.21%
Sub Kegiatan Penelitian dan pengembangan lingkungan hidup	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000	100.00%
Sub Kegiatan Penelitian dan pengembangan pekerjaan umum	Rp 400,000,000	Rp 359,326,435	89.83%
Kegiatan Pengembangan inovasi dan teknologi	Rp 1,157,182,886	Rp 1,040,545,801	89.92%
Sub Kegiatan Penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	Rp 625,000,000	Rp 584,719,825	93.56%
Sub Kegiatan Diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	Rp 110,385,000	Rp 109,956,545	99.61%
Sub Kegiatan Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	Rp 127,747,661	Rp 72,569,431	56.81%
Sub Kegiatan Fasilitasi hak kekayaan intelektual	Rp 294,050,225	Rp 273,300,000	92.94%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 14,724,302,050	Rp 12,839,215,551	87.20%
Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Rp 367,000,000	Rp 365,398,104	99.56%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp 367,000,000	Rp 365,398,104	99.56%
Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	Rp 9,996,157,000	Rp 8,542,623,267	85.46%
Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp 9,996,157,000	Rp 8,542,623,267	85.46%
Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Rp 1,165,000,000	Rp 1,164,947,529	100.00%
Sub Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp 1,165,000,000	Rp 1,164,947,529	100.00%
Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Rp 1,281,362,700	Rp 1,173,667,475	91.60%

Uraian	Anggaran		
	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4
Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 10,000,000	Rp 8,877,225	88.77%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 535,684,840	Rp 525,481,007	98.10%
Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Rp 498,917,860	Rp 423,610,172	84.91%
Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 100,000,000	Rp 86,731,150	86.73%
Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 6,760,000	Rp 5,130,000	75.89%
Sub Kegiatan Fasilitas kunjungan tamu	Rp 30,000,000	Rp 26,157,921	87.19%
Sub Kegiatan Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Rp 100,000,000	Rp 97,680,000	97.68%
Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Rp 468,000,000	Rp 375,000,000	80.13%
Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau semua kendaraan dinas jabatan	Rp 468,000,000	Rp 375,000,000	80.13%
Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp 476,353,500	Rp 413,560,640	86.82%
Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 4,000,000	Rp 3,036,000	75.90%
Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 7,293,500	Rp 4,762,831	65.30%
Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 33,200,000	Rp 28,284,000	85.19%
Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp 431,860,000	Rp 377,477,809	87.41%
Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp 970,428,850	Rp 804,018,536	82.85%
Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp 199,000,000	Rp 153,756,063	77.26%

Uraian	Anggaran		
	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4
Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp 278,907,400	Rp 169,026,625	60.60%
Sub Kegiatan Pemeliharaan mebel	Rp 100,000,000	Rp 99,145,200	99.15%
Sub Kegiatan Pemeliharaan perakatan dan mesin lainnya	Rp 67,521,450	Rp 62,102,106	91.97%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp 325,000,000	Rp 319,988,542	98.46%
Total	Rp 22,322,309,543	Rp 19,482,856,265	87.28%

Sumber: SPJ fungsional Bappeda Litbang Tahun 2025

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Secara umum, Bappeda Litbang Kota Balikpapan pada tahun 2025 telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan. Hal ini tercermin dari rata-rata capaian sebesar 101.59% berdasarkan perjanjian kinerja perubahan tahun 2025. Sedangkan capaian berdasarkan perjanjian kinerja perubahan Bappeda Litbang tahun 2025 atas Renstra Bappeda Litbang tahun 2025-2029 adalah sebesar 102.18%. Capaian indikator tersebut dicapai melalui program:

1. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
2. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
3. Program penelitian dan pengembangan
4. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Pencapaian ini tidak terlepas dari pelaksanaan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan secara konsisten, serta peran aktif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi demi kemajuan pembangunan Kota Balikpapan. Sementara itu, dari sisi akuntabilitas keuangan, realisasi anggaran mencapai 87.28% dari total anggaran belanja, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 12.72%.

4.2. Saran

Dalam meningkatkan kinerja maka terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan antara lain:

1. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dalam menyampaikan aspirasi atau usulan program dan kegiatan pembangunan;
2. Meningkatkan pemahaman dan kompetensi perangkat daerah Kota Balikpapan, baik legislatif dan eksekutif dalam penyusunan atau pembahasan dokumen perencanaan;
3. Sosialisasi, regulasi dan monitoring yang mengharuskan komitmen eksekutif dan legislatif untuk menjamin integrasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran;

4. Melakukan evaluasi terhadap hasil penelitian, studi dan kajian yang belum ditindak lanjuti oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan ataupun perangkat daerah teknis lainnya;
5. Mendorong inovasi berbasis teknologi dan perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Corporate Governance and Clear Government* yang melibatkan *stakeholder* sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Litbang Kota Balikpapan ini dapat menjadi bahan atau informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kota Balikpapan. Semoga pada tahun mendatang kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan dapat semakin ditingkatkan searah dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang Kota Balikpapan selaku perencana dan koordinator pembangunan di Kota Balikpapan.